

LKIP

PEMERINTAH KOTA BIMA
TAHUN 2019

KANTOR WA IKOTA BIMA



KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Bima Tahun 2019 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bima disusun sesuai Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Pemerintah Daerah selama tahun 2019 dan sebagai bentuk konsistensi kami dalam upaya menciptakan transparansi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 memuat informasi tentang perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi Pembangunan Kota Bima periode 2019-2023 yaitu **mewujudkan Kota Bima yang Berkualitas dan Setara menuju Masyarakat yang Maju dan Mandiri**.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Bima tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan Pemerintah Daerah, baik dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKIP Kota Bima Tahun 2019.

Demikian LKIP Tahun 2019 kami sampaikan, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi dan melimpahkan rahmatNya kepada kita semua menuju pada arah yang lebih baik. Aamiin.

Kota Bima, 24 Maret 2020
WALIKOTA BIMA,

H. MUHAMMAD LUTFI, SE.

IKHTISAR EKSEKUTIF



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Kota Bima Tahun 2019 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan Pemerintah yang baik (*Good Governance*). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bima disusun sesuai Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pemerintah Kota Bima telah menetapkan 16 sasaran dan 18 indikator sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023 dan Peraturan Walikota Bima Nomor 51 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Bima Tahun 2019-2023. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran bahwa Pemerintah Kota Bima telah memperoleh predikat kinerja kategori sangat tinggi dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 106 % dari 16 sasaran, yang terdiri dari ; (a) 13 sasaran termasuk kategori sangat tinggi dan (b) 3 sasaran termasuk kategori tinggi.

Keberhasilan capaian kinerja tersebut didukung adanya kerja sama yang sinergis dari seluruh jajaran Perangkat Daerah dan pihak-pihak yang terkait dengan didukung oleh program dan kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima tahun 2019 sebesar Rp.902.173.491.381,85 dengan realisasi sebesar Rp. 69.254.308.670,97 atau 85,23 %. Atas pencapaian tersebut, maka Pemerintah Kota Bima tahun 2019 mampu efisiensi anggaran sebesar Rp. 41.740.678.680.- atau 13,57% dengan tingkat pencapaian sangat baik.

Pencapaian kinerja Pemerintah Kota Bima tahun 2019 menunjukkan keberhasilan dalam memenuhi target tahunan sesuai RPJMD 2018-2023. Adapun adanya target yang masih kurang pencapaiannya Pemerintah Kota Bima akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi untuk dilakukan perbaikan di masa mendatang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GRAFIK.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Kota Bima	3
1. Letak Geografis	3
2. Luas Wilayah.....	3
3. Topografi	4
4. Kependudukan	5
5. Tata Kelola Pemerintahan	9
a. Pembentukan Kota Bima	9
b. Kedudukan dan Kewenangan	11
c. Perangkat Daerah	13
d. SDM Aparatur.....	15
e. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	15
6. Perekonomian Kota Bima.....	17
a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	17
b. Inflasi.....	19
7. Potensi Unggulan Daerah.....	19
C. Isu Strategis Jangka Menengah.....	25
BAB II PERJANJIAN KINERJA	28
A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan	28
a. Visi dan Misi	28
b. Tujuan dan Sasaran	31
B. Prioritas Daerah	33
C. Indikator Kinerja Utama	33
D. Perjanjian Kinerja	36
E. Program dan Anggaran	37

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	43
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	44
1. Pengukuran Kinerja Sasaran.....	44
2. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran	47
a. Sasaran 1 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	47
b. Sasaran 2 :Meningkatnya Aksesibilitas Dan Kualitas Pendidikan ..	50
c. Sasaran 3 : Meningkatnya Daya Beli masyarakat	53
d. Sasaran 4 : Meningkatnya Ketahanan Pangan	56
e. Sasaran 5 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	61
f. Sasaran 6 : Menurunnya Angka Kemiskinan	64
g. Sasaran 7 : Meningkatnya Kesempatan Kerja	67
h. Sasaran 8 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	69
i. Sasaran 9 : Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah.....	80
j. Sasaran 10 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.....	83
k. Sasaran 11 : Ningkatnya Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang.....	86
l. Sasaran 12 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	88
m. Sasaran 13 : Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	90
n. Sasaran 14 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah.....	93
o. Sasaran 15 : Meningkatnya Ketahanan Terhadap Bencana	95
p. Sasaran 16 : Meningkatnya Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban.....	97
B. Realisasi Keuangan	100
BAB V : PENUTUP	108

Lampiran-Lampiran

1. Indikator Kinerja Utama tahun 2019-2023
2. Perjanjian Kinerja tahun 2019

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Wilayah menurut kecamatan tahun 2019	3
Tabel 1.2	Kemiringan lahan	4
Tabel 1.3	Kepadatan penduduk menurut kecamatan tahun 2019.....	5
Tabel 1.4	Jumlah penduduk menurut kecamatan tahun 2019.....	6
Tabel 1.5	Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur tahun 2019.....	8
Tabel 1.6	Jumlah penduduk menurut agama	14
Tabel 1.7	Perangkat Daerah.....	14
Tabel 1.8	Daftar Kelurahan	14
Tabel 1.9	Capaian Sasaran Reformasi Birokrasi.....	16
Tabel 2.1	Perumusan penjelasan visi	29
Tabel 2.2	Perumusan penjelasan misi.....	30
Tabel 2.3	Sasaran dan tujuan pembangunan Kota Bima.....	32
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama	34
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja	36
Tabel 2.6	Program dan Anggaran tahun 2019.....	38
Tabel 3.1	Skala nilai peringkat kinerja	40
Tabel 3.2	Pengukuran pencapaian sasaran tahun 2019.....	41
Tabel 3.3	Rekapitulasi pencapaian sasaran.....	42
Tabel 3.4	Analisis pencapaian indikator sasaran 1	43
Tabel 3.5	Analisis pencapaian indikator sasaran 2.....	46
Tabel 3.6	Analisis pencapaian indikator sasaran 3.....	49
Tabel 3.7	Perhitungan PPH Ketersediaan Kota Bima tahun 2019	52
Tabel 3.8	Analisis pencapaian indikator sasaran 4.....	53
Tabel 3.9	Analisis pencapaian indikator sasaran 5.....	57
Tabel 3.10	Pertumbuhan PDRB Kota Bima tahun 2019	58
Tabel 3.11	Analisis pencapaian indikator sasaran 6.....	60
Tabel 3.12	Analisis pencapaian indikator sasaran 7.....	62
Tabel 3.13	Analisis pencapaian indikator sasaran 8.....	64
Tabel 3.14	Analisis pencapaian indikator kinerja SAKIP.....	65
Tabel 3.15	Perbandingan Nilai SAKIP Kota Bima tahun 2018-2019	67
Tabel 3.16	Analisis pencapaian indikator kinerja nilai LPPD.....	69
Tabel 3.17	Nilai LPPD Pemerintah Kota Bima tahun 2015-2018.....	70
Tabel 3.18	Pencapaian Opini BPK terhadap LKPD KPemerintah Kota Bima tahun 2014-2018	73
Tabel 3.19	Analisis pencapaian indikator sasaran 9.....	76
Tabel 3.20	PAD Kota Bima tahun 2015-2019	77
Tabel 3.21	Rincian PAD berdasarkan jenis obyek pajak Kota Bima tahun 2019	77

Tabel 3.22	Analisis pencapaian indikator sasaran 10	79
Tabel 3.23	Pengukuran IKM pada Unit Penyelenggara pelayanan Publik lingkup Kota Bima.....	79
Tabel 3.24	Analisis pencapaian indikator sasaran 11.....	82
Tabel 3.25	Analisis pencapaian indikator sasaran 12.....	84
Tabel 3.26	Analisis pencapaian indikator sasaran 13	85
Tabel 3.27	Capaian pengurangan kawasan kumuh tahun 2017-2019.....	86
Tabel 3.28	Luas kawasan kumuh berdasarkan kelurahan tahun 2019.....	87
Tabel 3.29	Analisis pencapaian indikator sasaran 14	89
Tabel 3.30	Perbandingan kualitas infrastruktur di Kota Bima tahun 2018-2019.....	89
Tabel 3.31	Analisis pencapaian indikator sasaran 15	90
Tabel 3.32	Analisis pencapaian prioritas indeks ketahanan daerah tahun 2018-2019	91
Tabel 3.33	Analisis pencapaian indikator sasaran 16	93
Tabel 3.34	Persentase penurunn angka kriminalitas tahun 2018-2019	93
Tabel 3.35	Analisis efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran tahun 2019	95
Tabel 3.36	Realisasi program dan anggaran tahun 2019	102

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Jumlah PNS Pemerintah Kota Bima tahun 2019	15
Grafik 3.1	Perbandingan AHH Kota Bima dengan NTB tahun 2019	44
Grafik 3.2	Perbandingan AHH Kota Bima , NTB dan Nasional tahun 2019	45
Grafik 3.3	Perbandingan Indeks Pendidikan Kota Bima , NTB dan Nasional tahun 2019	47
Grafik 3.4	Perbandingan Indeks Pendidikan Kota Bima 2015-2019	47
Grafik 3.5	Perbandingan pengeluaran perkapita/bulan tahun 2019	49
Grafik 3.6	Perbandingan pengeluaran perkapita/bulan Kota Bima , NTB dan Nasional 2019	50
Grafik 3.7	Skor PPH Kota Bima tahun 2017-2019.....	54
Grafik 3.8	Perbandingan pertumbuhan PDRB Kota Bima , NTB dan Nasional tahun 2019	57
Grafik 3.9	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kota Bima , NTB dan Nasional tahun 2019	60
Grafik 3.10	Perbandingan Penduduk Miskin Kota Bima tahun 2015-2019	61
Grafik 3.11	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bima , NTB dan Nasional tahun 2019	63
Grafik 3.12	Perolehan Nilai SAKIP Kota Bima tahun 2015-2019.....	66
Grafik 3.13	Perolehan Nilai SAKIP Kota Bima menurut Indikator Penilaian tahun 2015-2019	68
Grafik 3.14	Perolehan Nilai LPPD Kota Bima tahun 2015-2019	71
Grafik 3.15	Perolehan PAD Kota Bima tahun 2015-2019.....	76
Grafik 3.16	Nilai pada unsur pelayanan publik pada Pemerintah Kota Bima 2019	80
Grafik 3.17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bima tahun 2018-2019	84
Grafik 3.18	Luas kawasan Kumuh Kota Bima tahun 2017-2019.....	86
Grafik 3.19	Perbandingan angka kriminalitas Kota Bima dengan Kabupaten/Kota dan Provinsi tahun 2019	94
Grafik 3.20	Perbandingan angka kriminalitas di Kota Bima tahun 2016-2019	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Persebaran Penduduk di Kota Bima menurut kecamatan	6
Gambar 1.2. Persebaran Penduduk di Kota Bima menurut pendidikan	8
Gambar 3.1. Indikasi ketidaksesuaian lahan tahun 2019	83
Gambar 3.2. Sebaran titik lokasi indikasi ketidaksesuain lahan tahun 2019	84



BABI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut pelaporan kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan



Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan LKIP Tahun 2019 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran, dengan demikian LKIP Kota Bima Tahun 2019 menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Walikota kepada Presiden ini disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LKIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2019.



B. Gambaran Umum Kota Bima

1. Letak Geografis

Secara geografis, Kota Bima terletak pada koordinat $8^{\circ}20' - 8^{\circ}30'$ Lintang Selatan dan antara $118^{\circ}41' - 118^{\circ}48'$ Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima
- Sebelah Timur : Kecamatan Wawo Kabupaten Bima
- Sebelah Selatan : Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima
- Sebelah Barat : Teluk Bima

2. Luas Wilayah

Secara keseluruhan Kota Bima memiliki luas wilayah 222,25 Km² mencakup 5 (lima) kecamatan dan 41 (empat puluh satu) kelurahan. Rincian luas wilayah berdasarkan masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan Tahun 2019

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)
1.	Rasanae Barat	10,14
2.	Rasanae Timur	64,07
3.	Asakota	69,03
4.	Raba	63,73
5.	Mpunda	15,28
	Jumlah	222,25

Sumber : Bagian Administrasi Pemerintahan SETDA Kota Bima



Jika dilihat dari luas wilayah bahwa Kecamatan Asakota sebagai kecamatan yang memiliki luas wilayah paling besar yaitu 60,03 km² sedangkan wilayah yang memiliki luas paling kecil adalah Kecamatan Rasanae Barat yaitu 10,14 km².

3. Topografi

Kota Bima didominasi oleh lahan dengan kemiringan datar dengan kelerengan 0-40 %, yaitu seluas 9.242 ha, kemudian lahan bergelombang seluas 4.994 ha, lahan dengan kemiringan curam seluas 4.534 ha, dan lahan dengan kondisi sangat curam dengan luas 2.957 ha. Rincian kemiringan lahan berdasarkan kecamatan dapat dilihat tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2
Kemiringan lahan

No	Kecamatan	Datar (0 - 2 %)	Bergelombang (2 - 15 %)	Curam (15 - 40 %)	Sangat Curam (> 40 %)
1.	Rasanae Barat	854	35	75	50
2.	Rasanae Timur	2.555	1.793	935	1.024
3.	Asakota	2.225	1.184	2.113	1.081
4.	Raba	2.950	1.850	848	627
5.	Mpunda	658	132	563	175
	Jumlah	9.242	4.994	4.534	2.957

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kota Bima

Pada umumnya semua kecamatan di Kota Bima didominasi oleh wilayah yang relatif datar dan bergelombang. Namun, ada 2 (dua) wilayah yang masih memiliki kemiringan sangat curam yaitu Kecamatan Asakota dan Kecamatan Rasanae Timur memiliki



kelerengan lebih dari 40% mencapai 34-36 persen. Luas Kecamatan Raba dengan kemiringan diatas 40% mencapai 21 persen. Sementara dua kecamatan lain (Kecamatan Rasanae Barat dan Mpunda) kemiringan diatas 40% hanya berkisar 1-6 persen.

4. Kependudukan

Jumlah penduduk Kota Bima pada tahun 2019 sebanyak 149.498 jiwa terdiri atas 73.990 jiwa penduduk laki-laki dan 75.508 jiwa penduduk perempuan. Penduduk Kota Bima mengalami pertumbuhan sebesar 2,04 % dibanding Tahun 2018 sebesar 146.959 jiwa. Kepadatan penduduk di Kota Bima Tahun 2019 mencapai 673 jiwa/km, sebagaimana terlihat pada tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3.
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2019

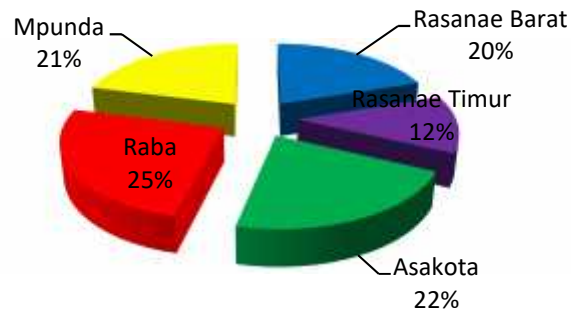
No.	Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
1.	Rasanae Barat	10,14	29.701	2.929
2.	Rasanae Timur	64,07	18.225	284
3.	Asakota	69,03	32.244	467
4.	Raba	63,73	37.919	595
5.	Mpunda	15,28	31.409	2.056
Jumlah		222,25	149.498	673

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima

Jika dilihat jumlah penduduk menurut kecamatan, penduduk terbesar berada di Kecamatan Raba sebesar 37.919 jiwa, dan yang terendah berada di kecamatan Rasanae Timur sebesar 18.225 jiwa.

Rincian jumlah penduduk menurut kecamatan dapat dilihat pada gambar 1 dan tabel 1.4 berikut.

Gambar 1.1 Persebaran Penduduk di Kota Bima Menurut Kecamatan Tahun 2019



Tabel 1.4.
Jumlah Penduduk Kota Bima Menurut Kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	Penduduk		Jumlah Penduduk
		L	P	
1.	Rasanae Barat	14.650	15.051	29.701
2.	Rasanae Timur	9.002	9.223	18.225
3.	Asakota	16.211	16.033	32.244
4.	Raba	18.634	19.285	37.919
5.	Mpunda	15.493	15.916	31.409
	Jumlah	73.990	75.508	149.498

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima

Struktur penduduk Kota Bima didominasi oleh penduduk yang berusia usia dibawah 40 tahun. Komposisi penduduk menurut usia akan mempengaruhi kebijakan pembangunan kota. Keterkaitan komposisi penduduk dengan upaya-upaya pembangunan kota yang dilaksanakan, didasarkan kepada kebutuhan pelayanan yang harus disediakan kepada masing-



masing kelompok penduduk, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan bahkan pelayanan kesejahteraan sosial lainnya. Komposisi penduduk Kota Bima menurut Struktur Usia dapat dilihat pada tabel 1.5 berikut.

Tabel 1.5.
Jumlah Penduduk
Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2019

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
00-04	6.227	5.818	12.045
05-09	7.401	6.982	14.383
10-14	7.324	6.663	13.987
15-19	5.018	5.293	10.311
20-24	5.999	6.093	12.092
25-29	6.039	6.293	12.332
30-34	6.409	6.521	12.930
35-39	6.165	6.493	12.658
40-44	5.414	5.881	11.295
45-49	4.637	4.887	9.524
50-54	3.921	4.344	8.265
55-59	3.100	3.277	6.377
60-64	2.308	2.552	4.860
65-69	1.760	1.821	3.581
70-74	1.034	1.240	2.274
≥ 75	1.234	1.350	2.584
Jumlah	73.990	75.508	149.498

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima

Penduduk Kota Bima mayoritas beragama islam yaitu berjumlah 98,58 %. Kerukunan antar umat beragama sangat baik sehingga konflik antar agama tidak pernah terjadi di Kota Bima. Rincian jumlah penduduk menurut agama dapat dilihat tabel 1.6 berikut.

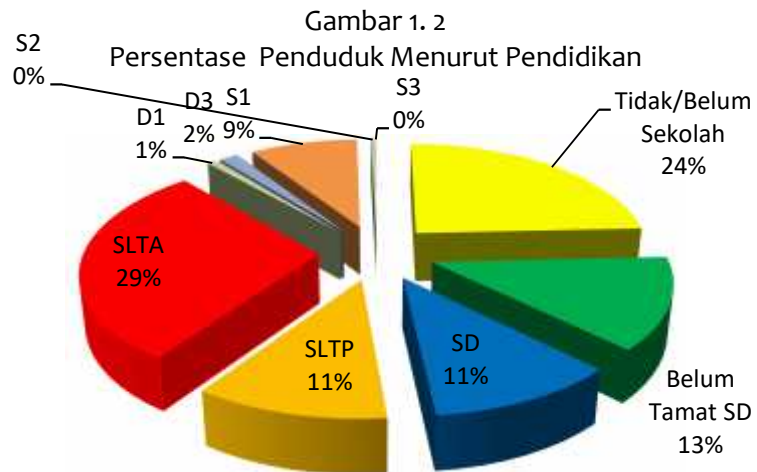


Tabel 1.6. : Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk
1.	Islam	147.377	98,58
2.	Protestan	1.188	0,79
3.	Katolik	745	0,49
4.	Hindu	180	0,12
5.	Budha	38	0,02
Jumlah		149.498	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima

Jumlah penduduk di Kota Bima pada tahun 2019 jika dilihat dari tingkat pendidikan, diketahui bahwa penduduk dengan tingkat pendidikan SLTA/ sederajat memiliki jumlah paling besar yaitu 43.287 orang atau 29 %. Selengkapnya jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di Kota Bima pada tahun 2019 dapat dilihat pada gambar 2 berikut.





5. Tata Kelola Pemerintahan

a. Pembentukan Kota Bima sebagai Daerah Otonom

Pemerintah Kota Bima dibentuk menjadi Daerah Otonom melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, Kota Bima merupakan pusat Pemerintahan Kesultanan yang pernah mengalami masa keemasan sekitar kurun waktu 1933 M hingga 1951 M yang diperintah oleh 14 Sultan Bima. Selanjutnya memasuki era kemerdekaan Indonesia, Kesultanan Bima memilih bergabung berada dalam wilayah NKRI sehingga berubah dari Pemerintah Kesultanan Bima menjadi Pemerintah Swapraja Bima dengan pusat pemerintahan di Kota Bima.

Kemudian pada era Indonesia Serikat, Kota Bima tetap menjadi pusat Pemerintahan Daerah Swatantra Tingkat II Bima. Kemudian pada tahun 1958 Pemerintah Swatantra Tingkat II Bima berubah menjadi Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dan tetap menjadikan Kota Bima sebagai ibukota Kabupaten Bima setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan Propinsi NTB dan Undang-Undang nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan



Daerah Tingkat II Se-Propinsi Bali, NTB, dan NTT.

Seiring dengan kebutuhan dan perkembangan Kota Bima, baik sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, pendidikan, politik, sosial dan budaya, maka Kota Bima sejak Tahun 1998 telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai salah satu Kota Administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1998 tentang pembentukan Kota Administratif sebagaimana telah dituangkan dalam Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 178, tanggal 22 Oktober 1998. Selanjutnya dengan memperhatikan aspirasi seluruh masyarakat, maka DPRD Kabupaten Bima melalui serangkaian proses persidangan akhirnya pada tanggal 22 Pebruari 2001 mengeluarkan keputusannya tentang persetujuan peningkatan status Pemerintah Administratif Bima menjadi Pemerintah Kota Bima, dan kemudian pada tanggal 23 Pebruari 2001 Pemerintah Kabupaten Bima mengirim surat tentang usulan peningkatan status Pemerintah Administratif Bima menjadi Pemerintah Kota Bima kepada Gubernur NTB dan DPRD NTB untuk diusulkan ke Pemerintah Pusat. Akhirnya tepat tanggal 10 April 2002 Pemerintah Kota Bima terbentuk menjadi Daerah Otonom melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat.



b. Kedudukan dan Kewenangan

Dengan diberlakukannya Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang lebih menekankan aspek desentralisasi yang diberikan dalam wujud otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Berkaitan dengan otonomi daerah dalam pelaksanaannya di Kota Bima dapat dijelaskan melalui 2 (dua) aspek, yaitu:

1) Aspek politik

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kota Bima dari aspek politik ditandai dengan program legislatif dalam membahas perubahan atas peraturan tentang struktur organisasi dan tata kerja dan kegiatan partai politik tingkat daerah dan DPRD sebagai mitra pemerintah daerah.

2) Administrasi

Pemerintah Kota Bima dalam melaksanakan otonomi daerah secara administratif diawali dengan melakukan identifikasi kewenangan pemerintah daerah, penataan kelembagaan, penempatan personil, pengelolaan sumber keuangan daerah, pengelolaan sarana dan prasarana (aset daerah), dan manajemen pelayanan publik. Pemerintah Kota Bima menyelenggarakan urusan



pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebanyak 25 urusan wajib untuk menyelenggarakan pelayanan dasar pemerintahan dan 6 urusan pilihan, terdiri dari :

- 1) Pendidikan
- 2) Kesehatan
- 3) Lingkungan Hidup
- 4) Pekerjaan Umum
- 5) Penataan Ruang
- 6) Perencanaan Pembangunan
- 7) Perumahan
- 8) Kepemudaan dan Olahraga
- 9) Penanaman Modal
- 10) Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- 11) Kependudukan dan Catatan Sipil
- 12) Ketenagakerjaan
- 13) Ketahanan Pangan
- 14) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 15) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
- 16) Perhubungan
- 17) Komunikasi dan Informatika
- 18) Pertanahan
- 19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri



20) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

21) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

22) Sosial

23) Kebudayaan

24) Kearsipan, dan

25) Perpustakaan

sedangkan urusan pilihan terdiri dari :

1) Kelautan dan Perikanan

2) Pertanian

3) Pariwisata

4) Industri

5) Perdagangan, dan

6) Ketransmigrasian.

c. Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Walikota Bima dibantu oleh Perangkat Daerah. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat



Daerah Kota Bima bahwa perangkat daerah Kota Bima berjumlah 34, dengan rincian sesuai tabel 1.7 dan 1.8 berikut:

Tabel 1.7
Daftar Perangkat Daerah

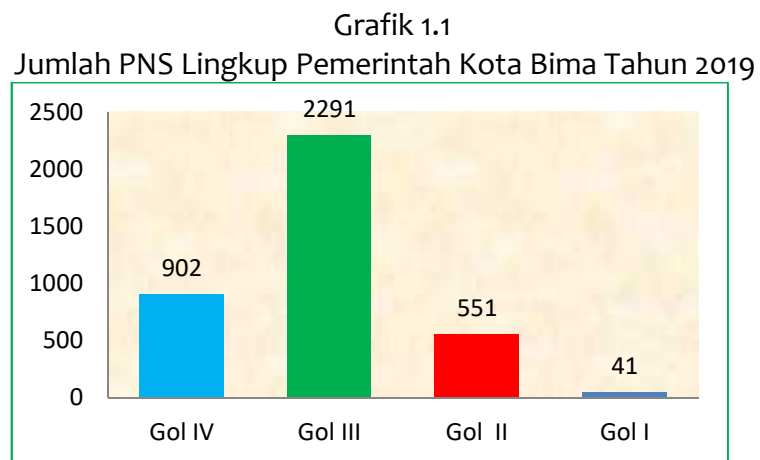
Staf Ahli Walikota	Sekretariat Daerah	Sekretariat DPRD	Inspektorat	Badan-Badan Daerah	Dinas-Dinas Daerah	Kecamatan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik. 2. Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. 3. Staf Ahli Walikota Bidang Kesejahteraan Rakyat, Masyarakat dan SDM. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial <ol style="list-style-type: none"> a. Bagian Administrasi Pemerintahan. b. Bagian Kesejahteraan Rakyat. c. Bagian Hukum 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan <ol style="list-style-type: none"> a. Bagian Perekonomian. b. Bagian APP. c. Bagian LPBJ. 3. Asisten Administrasi Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Bagian Organisasi. b. Bagian Umum. c. Bagian Humas dan Protokol. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Hukum dan Persidangan. 2. Bagian Umum, Humas dan Protokol. 3. Bagian Keuangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris 2. Inspektur Pembantu I. 3. Inspektur Pembantu II 4. Inspektur Pembantu Investigasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. BAPPEDA dan LITBANG 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3. Badan Kepegawaian dan PSDM 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2. Satpol PP 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 4. Dinas Kesehatan 5. Dinas PU dan Penataan Ruang 6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 7. Dinas Sosial 8. Dinas Tenaga Kerja 9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA 10. Dinas Ketahanan Pangan 11. Dinas Lingkungan Hidup 12. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 13. Dinas Perhubungan 14. Dinas Komunikasi dan Informatika 15. Dinas Statistik Daerah 16. Dinas Koperindag 17. Dinas Penanaman Modal dan PTSP 18. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 19. Dinas Kelautan dan Perikanan 20. Dinas Pariwisata 21. Dinas Pertanian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Asakota 2. Kecamatan Rasanae Barat 3. Kecamatan Mpunda 4. Kecamatan Rasanae Timur 5. Kecamatan Raba

Tabel 1.8
Daftar Kelurahan Menurut Kecamatan Lingkup Pemerintah Kota Bima Tahun 2019

Kecamatan Asakota	Kecamatan RasanaE Barat	Kecamatan RasanaE Timur	Kecamatan Mpunda	Kecamatan Raba
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan Jatibaru 2. Kelurahan Kolo 3. Kelurahan Jatiwangi 4. Kelurahan Jatibaru Timur 5. Kelurahan Melayu 6. Kelurahan Ule 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan Dara 2. Kelurahan NaE 3. Kelurahan Pane 4. Kelurahan Paruga 5. Kelurahan Sarae 6. Kelurahan Tanjung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan Dodu 2. Kelurahan Kodo 3. Kelurahan Kumbe 4. Kelurahan Lampe 5. Kelurahan Lelamase 6. Kelurahan Nungga 7. Kelurahan Oi Fo'o 8. Kelurahan Oimbo 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan Lewirato 2. Kelurahan Mandé 3. Kelurahan Manggemaci 4. Kelurahan Matakando 5. Kelurahan Monggonao 6. Kelurahan SambinaE 7. Kelurahan Santi 8. Kelurahan Panggi 9. Kelurahan Sadia 10. Kelurahan Penatoi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan Kendo 2. Kelurahan PenanaE 3. Kelurahan Penaraga 4. Kelurahan Rabadompu Timur 5. Kelurahan Rabadompu Barat 6. Kelurahan Rabangodu Selatan 7. Kelurahan Rabangodu Utara 8. Kelurahan Rite 9. Kelurahan Rontu 10. Kelurahan Nitu 11. Kelurahan Ntobo

c. SDM Aparatur

Dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan mempermudah pelaksanaan pelayanan publik saat ini Pemerintah Kota Bima Tahun 2019 telah memiliki PNS sebanyak 3.785 (*Tiga Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima*) orang, dengan rincian sebagaimana grafik 1.1 berikut.



d. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kota Bima telah berjalan secara lancar, dengan tingkat capaian sasaran pada masing-masing indikator sebagaimana pada tabel 1.9 berikut.



Tabel 1.9
Capaian Sasaran Reformasi Birokrasi

Sasaran Reformasi Birokrasi	Indikator	Baseline (2019)	Target (2024)
1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.	a. Opini WTP atas laporan keuangan.	WTP	WTP
	b. Level kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP).	III	IV
	c. Tingkat Kematangan Implementasi SPIP.	II	IV
	d. Instansi pemerintah yang akuntabel (Skor B atas SAKIP).	B (67,05)	A (85,00)
	e. Penggunaan <i>e-Procurement</i> terhadap belanja pengadaan barang dan jasa melalui Sistem pengadaan secara elektronik (SPSE).	99 %	100 %
2. Birokrasi yang Efektif dan Efisien	a. Indeks Reformasi Birokrasi	-	-
	b. Indeks Profesionalitas ASN	-	-
	c. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	C (2,6)	A (3,0)
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.	a. Indeks kepuasan masyarakat	B 77,54	A (88,50)
	b. Persentase kepatuhan pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait pelayanan publik (Zona Hijau).	89,43	95
	c. Indeks Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Sangat Tinggi (3,1845)	Sangat Tinggi (3,2300)
	c. Indeks inovasi daerah	Inovatif 890	Sangat Inovatif 1500



6. Pertumbuhan ekonomi Kota Bima

Perekonomian Kota Bima ditunjang dari berbagai sektor, diantaranya jasa, perdagangan, pertanian dan pariwisata. Kota Bima merupakan satu-satunya kota di Pulau Sumbawa Provinsi NTB. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bima pada tahun 2018 yaitu sebesar 4,85%, di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi NTB yang sebesar -4,56%.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bima

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan salah satu indikator yang menghitung jumlah nilai tambah yang terjadi diseluruh sektor ekonomi yang beroperasi pada periode tertentu di suatu wilayah. Dalam hal ini angka PDRB tersedia atas dasar harga berlaku dan juga atas dasar harga konstan. Di tahun 2018 besaran nilai PDRB Kota Bima atas dasar harga berlaku telah mencapai 3.964 milyar rupiah, Angka tersebut meningkat setiap tahunnya dengan peningkatan diatas 10 persen atau dengan besaran rata-rata 322 milyar pertahunnya dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.

Pada besaran nilai PDRB atas dasar harga konstan terjadi penambahan 134 milyar dari tahun sebelumnya yang menjadikan nilai PDRBnya menjadi sebesar 2.887 milyar rupiah



pada tahun 2018. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Bima pada tahun 2018 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan. Peranan dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor yaitu mencapai 24,42 persen (angka ini meningkat dari 24,12 persen di tahun 2017).

Selanjutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,48 persen (turun dari 13,57 persen di tahun 2017), disusul oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 11,94 persen (turun dari 12,19 persen di tahun 2017). Berikutnya lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,11 persen (turun dari 10,19 persen di tahun 2017) dan Konstruksi sebesar 9,16 persen.

Dari distribusi tersebut terlihat bahwa sampai dengan tahun 2018 ini, perekonomian Kota Bima masih sangat tergantung pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sehingga apabila sektor ini terganggu, akan berdampak besar terhadap perekonomian di Kota Bima.



b. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator untuk melihat stabilitas perekonomian suatu daerah dengan melihat perubahan harga barang/jasa yang umum dikonsumsi masyarakat. Tingkat inflasi/deflasi menggambarkan daya beli masyarakat. Semakin tinggi inflasi, maka semakin rendah nilai uang dan semakin rendah daya beli masyarakat.

inflasi di Kota Bima lebih tinggi dari inflasi Provinsi NTB dan Inflasi Nasional. Besaran nilai inflasi dari 2016 ke 2017 mengalami peningkatan yang artinya terjadi penurunan daya beli masyarakat di Tahun 2017 dibandingkan tahun-tahun 2016. Pada tahun 2018 daya beli masyarakat kembali mengalami penurunan walaupun tidak signifikan seperti tahun 2017.

7. Potensi Unggulan Daerah

a. Pertanian

Sektor pertanian masih memegang peranan penting dalam perekonomian Kota Bima serta masih menjadi salah satu mata pencaharian utama bagi sebagian besar penduduk di Kota Bima. Peranan sektor pertanian di Kota Bima masih cukup penting, karena kontribusinya dalam pembentukan PDRB menempati posisi kedua terbesar, yakni mencapai angka 13,48



persen pada tahun 2018. Lahan sawah terbagi menjadi sawah dengan irigasi teknis, dengan luas 2.073 ha dan sawah tadah hujan dengan luas 349 ha. Lahan sawah terbesar terdapat di Kecamatan Rasanae Timur dan di Kecamatan Raba. Dua kecamatan ini pun memiliki jaringan irigasi teknis yang memadai dibanding dengan kecamatan yang lain.

Komoditas pertanian yang utama di Kota Bima meliputi padi, jagung, kacang kedelai, kacang hijau, kacang tanah, ubi-ubian. Wilayah pertanian di Kota Bima terkonsentrasi di 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Raba dan Rasanae Timur. Lahan pertanian di dua kecamatan ini masih luas dibandingkan dengan kecamatan lainnya.

b. Perdagangan

Sektor perdagangan memiliki posisi penting dalam perekonomian Kota Bima. Kegiatan perdagangan di Kota Bima tidak hanya melayani kebutuhan penduduk lokal, tapi juga bagi penduduk wilayah sekitarnya. Ketersediaan infrastruktur yang menunjang sektor perdagangan, seperti pelabuhan dan pusat perdagangan menjadikan Kota Bima menjadi pusat arus distribusi barang dan jasa. Adapun perkembangan perusahaan



perdagangan di Kota Bima menunjukkan tren yang cukup menggembirakan.

Banyaknya jumlah usaha industri di Kota Bima tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi investor untuk menginvestasikan dananya. Pada tahun 2018, jumlah investasi pada usaha industri telah mencapai lebih dari 21 milyar rupiah. Diantara sentra usaha industri yang ada di Kota Bima, sentra pangan menjadi sentra dengan jumlah investasi terbesar yang nilainya mencapai 6,75 milyar rupiah atau setara dengan 31,15 persen dari jumlah investasi pada IKM di Kota Bima. Kemudian disusul dengan sentra pangan, sentra bahan bangunan dan kimia, sentra logam dan elektronika, dan yang terakhir adalah sentra kerajinan. Industri tenun, sebagai salah satu industri kerajinan belum mampu menarik Investor untuk berinvestasi pada sentra ini. Hal ini terlihat dari masih rendahnya jumlah investasi pada sentra ini yang nilainya hanya 168 juta rupiah atau 3,98 persen dari total investasi pada IKM di Kota Bima.

Kawasan perdagangan di Kota Bima terdapat di Kecamatan Rasanae Barat, di mana di kawasan ini terdapat Pasar Raya, dan kawasan pertokoan. Skala pelayanan kawasan perdagangan di Kecamatan Rasanae Barat adalah skala



regional. Selain itu kawasan perdagangan juga terdapat di Kecamatan Raba, yaitu dengan adanya Pasar Raba, Pasar Penaraga dan Pasar Kumbe. Kemudian di Kecamatan Asakota terdapat Pasar Jatibaru, namun skala pelayanannya masih lokal dan terbatas pada wilayah sekitar pasar tersebut.

c. Pariwisata

Potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kota Bima meliputi wisata budaya dan wisata alam. Namun potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, di mana saat ini masih terbatas pada wisatawan lokal. Jika dilihat secara geografis, posisi Kota Bima berada di antara dua kawasan yang menjadi tujuan wisata, yaitu Pulau Lombok di sebelah barat dan Pulau Komodo di sebelah timur. Sehingga secara geografis Kota Bima sangat berpotensi untuk mengembangkan sektor pariwisatanya mengingat letak wilayah yang cukup strategis. Beberapa obyek wisata yang ada di Kota Bima secara sekilas dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Istana Kayu *Asi Bou*

Istana ini terletak di samping timur Istana Bima (sekarang Museum *Asi Mbojo*). Dinamakan *Asi Bou* karena didirikan setelah pendirian Istana Bima pada tahun 1927, tepatnya



pada masa pemerintahan Sultan Ibrahim (1881-1936). *Asi Bou* dibangun untuk Putera Mahkota Muhammad Salahuddin.

2) Museum Asi Mbojo

Museum Asi Mbojo dulunya merupakan Istana bagi Raja dan Sultan Bima. Museum ini dikonstruksi dengan campuran gaya Eropa dan Bima pada tahun 1927 oleh Mr. Obzicshteer Rehata. Lokasinya berada di pusat kota dan mudah diakses. Di Museum ini terdapat silsilah/tata urutan Raja dan Kesultanan Bima, benda tata urutan kepangkatan pemerintahan, barang-barang serta pakaian adat yang digunakan Istana Kerajaan, para prajurit serta masyarakat pada jaman itu. Selain itu juga dipamerkan benda-benda yang tidak hanya berasal dari jaman kerajaan dan kesultanan, tetapi juga benda-benda purbakala sebelum masa kerajaan dan kesultanan Bima.

3) Museum Samparaja

Museum ini terletak di Jalan Gajah Mada Kelurahan Moggonao Kota Bima. Koleksi yang ada di museum ini antara lain Kitab BO yang asli, kitab yang membahas ihwal Kerajaan Bima pada abad 14 Masehi. Selain itu terdapat benda-benda peninggalan kesultanan Bima.



4) Pantai Lawata

Pantai Lawata merupakan salah satu tempat tujuan wisata utama bagi masyarakat Kota Bima. Di kawasan pantai ini pengunjung dapat menikmati berbagai makanan khas Kota Bima dan melakukan aktifitas olahraga seperti berenang.

5) Pantai Amahami

Pantai Amahami juga merupakan tempat tujuan bagi masyarakat Kota Bima untuk berwisata. Kawasan pantai ini ramai terutama pada sore dan malam hari, dengan berbagai aktifitas yang ada seperti pedagang kaki lima. Pantai ini berdekatan dengan Pantai Lawata atau berada sebelum Pantai Lawata dari arah Terminal Dara. Selain pantai-pantai tersebut, di kawasan pesisir Teluk Bima masih terdapat obyek-obyek wisata yang menarik untuk dikunjungi, seperti Pantai Kolo dan Pantai So Ati.

6) Pantai Kolo

Pantai ini terletak di kawasan Perairan Kolo. Kapal-kapal laut yang hendak menuju Pelabuhan Bima harus melalui Perairan Kolo yang merupakan satu-satunya pintu masuk menuju pelabuhan Bima. Selain ramai dikunjungi para pelancong, pantai ini juga menawarkan panorama dan keindahan alamnya.



C. Isu Strategis Jangka Menengah

Berdasarkan isu-isu strategis pembangunan Kota Bima yang menjadi perhatian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut.

1. Isu strategis tentang peningkatan kualitas dan daya saing masyarakat.

Peningkatan kualitas melalui pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan pendapatan penduduk. Isu strategis pada bidang kesehatan meliputi: kasus gizi buruk, kesehatan Ibu hamil, kesehatan Ibu melahirkan, kesehatan bayi, *stunting*, kualitas pelayanan berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana, kesehatan, keterbatasan dokter spesialis dan tenaga kesehatan yang berkompeten. Sedangkan isu strategis pada bidang pendidikan meliputi: keterjangkauan pelayanan pendidikan yang berkaitan dengan akses dan pembiayaan, Pendidikan Anak Usia Dini, penuntasan pendidikan dasar, dan peningkatan tata kelola layanan lembaga pendidikan.

2. Isu strategis tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat berkaitan erat dengan persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan harus dipandang sebagai kondisi yang tidak saja berkaitan dengan ketidakmampuan ekonomi tetapi juga kegagalan dalam memenuhi hak-hak dasar, perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok



orang dalam menjalani hidupnya secara bermartabat. Pada aspek pembangunan ekonomi, meskipun menunjukkan pertumbuhan setiap tahunnya, sektor-sektor unggulan dan produktif belum berkembang dan memberikan nilai tambah secara optimal pada pendapatan masyarakat. Sektor pariwisata maupun industri kreatif pada dasarnya sangat potensial untuk dikembangkan mengingat kekayaan budaya maupun komoditi produk unggulan yang kita miliki.

3. Isu strategis tentang peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.

Isu tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Bima mencakup: perencanaan kinerja yang berkualitas, kualitas pengawasan dan kapabilitas APIP, akuntabilitas kinerja dan keuangan, peningkatan kapasitas dan profesionalisme ASN, peningkatan kualitas pelayanan publik (perijinan, administrasi kependudukan, kesehatan dan pendidikan).

4. Isu pembangunan Infrastruktur perkotaan dan penataan ruang yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana.

Beberapa isu strategis pada aspek ini meliputi: kemantapan jalan dan jembatan, pelayanan air bersih, *backlog* perumahan, penuntasan kawasan kumuh, kesenjangan pembangunan wilayah timur dan barat, ketaatan terhadap RTRW dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup



Pelayanan informasi rawan bencana, dan ketangguhan wilayah terhadap resiko bencana.

5. Isu strategis tentang eksistensi masyarakat berkarakter dan agamais.

Pembangunan masyarakat berkarakter berkaitan erat dengan penerapan tradisi dan budaya serta kearifan lokal di Kota Bima. Falsafah hidup masyarakat Bima yang sampai saat ini bahkan telah menjad motto pemerintah Kota Bima yaitu *Maja Labo Dahu*. Falsafah hidup ini selalu menjadi nasehat atau amanat orang-orang tua terhadap anak-naknya yang pergi merantau ke luar daerah. *Maja Labo Dahu* diartikan sebagai *Malu* dan *Takut* (*Maja* = *Malu*; *Dahu* = *Takut*). Merujuk pada kitab BO kesultanan Bima, *maja labo dahu* berarti malu untuk berbuat hal-hal yang diluar batas norma susila dan takut untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama.

6. Isu strategis yang terkait dengan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak, meliputi: indeks pemberdayaan gender relatif masih rendah, pencegahan dan penuntasan kasus Kekerasan kepada perempuan dan anak.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Pembangunan

1. Visi dan Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan kerangka pembangunan strategis Kota Bima untuk periode 5 (lima) tahun. Sebagai dokumen yang memuat penjabaran visi, misi dan program Pemerintah Kota Bima. RPJMD berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memerhatikan RPJP dan RPJM Nasional. Untuk periode 2018-2023 RPJMD Kota Bima disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023. Pemerintah Kota Bima telah menetapkan visi Pembangunan



Kota Bima Tahun 2018-2023 yaitu **"Mewujudkan Kota Bima yang Berkualitas dan Setara menuju Masyarakat yang Maju dan Mandiri"**.

Adapun penjelasan mengenai substansi Visi tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Perumusan Penjelasan Visi

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
"Mewujudkan Kota Bima yang Berkualitas dan Setara menuju masyarakat yang Maju dan Mandiri"	Kota Bima yang Berkualitas	Terbentuknya suatu komunitas yang mampu berfikir secara komperhensip dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang serta sektor pembangunan. Masyarakat yang berkualitas dapat dilihat dari beberapa aspek penting, yakni aspek fisik/jasmani, aspek psikis dan intelektual serta aspek kultural.
	Masyarakat Sejahtera	Suatu kondisi dimana taraf hidup masyarakat secara keseluruhan menjadi lebih baik dan lebih menyenangkan dari keadaan sebelumnya. Dalam perseptif ekonomi kondisi ini dapat dicapai dengan mengupayakan peningkatan ekonomi produktif dan pemerataan pembangunan serta Keadilan sosial ekonomi bagi seluruh masyarakat dengan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat lemah, kelompok rentan dan wilayah yang masih tertinggal
	Transparan	keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah
	Akuntabilitas	proses pertanggungjawaban terhadap pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodic
	Lingkungan Perkotaan yang Ramah	lingkungan Kota yang bisa memberikan akses kemudahan, kenyamanan, keamanan dan adil bagi seluruh warganya serta dapat meningkatkan vitalitas, sumber daya serta potensi yang ada di masyarakat dan wilayah
	Masyarakat Agamais	masyarakat yang bertaqwa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama

Sumber : RPJMD Kota Bima 2019-2023.



Untuk mewujudkan tercapainya visi tersebut, maka dijabarkan dalam 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Kota Bima sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan masyarakat berkualitas yang berdaya saing;
- 2) Mewujudkan masyarakat sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat yang berbasis pengembangan produk unggulan;
- 3) Menghadirkan penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- 4) Mewujudkan lingkungan yang berkualitas dan ramah, melalui penyediaan infrastruktur pendukung perkotaan yang terintegrasi dengan pengurangan Resiko bencana;
- 5) Mewujudkan masyarakat yang berkarakter dan agamais.

Adapun penjelasan substansi misi tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2
Perumusan Penjelasan Misi

Pokok-Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
Kota Bima yang Berkualitas	Misi Pertama : <i>Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang Berdaya Saing</i>	Mewujudkan suatu kondisi masyarakat baik secara kolektif maupun individual memiliki wawasan yang luas, cara berfikir komperhensip dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang serta sektor pembangunan.
Masyarakat Sejahtera	Misi Kedua : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan Peningkatan Ekonomi	- Adanya peningkatan kondisi kesejahteraan masyarakat secara signifikan yang terlihat dari pertumbuhan ekonomi daerah yang meningkat disertai dengan pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah. selain itu juga dengan memberikan keberpihakan/affirmatif dalam



Pokok-Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
	Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Produk Unggulan	peningkatan ekonomi khususnya kepada masyarakat lemah, kelompok rentan dan wilayah yang masih tertinggal. - Peningkatan ekonomi masyarakat akan berbasis pada potensi produk unggulan yang ada di Kota Bima baik di sektor pertanian maupun non pertanian, yang pada pengembangannya dapat memberikan lapangan kerja baru dan nilai tambah ekonomi;
Transparan	<i>Misi Ketiga :</i> Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.	Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui pelaksanaan tahapan-tahapan reformasi birokrasi sehingga akan meningkatkan Efektifitas capaian hasil pembangunan, Efisiensi dalam proses penganggaran dan pelaksanaan pembangunan, serta membuka ruang Partisipasi masyarakat dan swasta dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
Akuntabilitas		
Lingkungan Perkotaan yang Ramah	<i>Misi Keempat:</i> Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan Ramah, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana	Terwujudnya lingkungan Kota yang bisa memberikan akses kemudahan, kenyamanan, keamanan dan adil bagi seluruh warganya serta dapat meningkatkan vitalitas, sumber daya serta potensi yang ada di masyarakat dan wilayah. Sehubungan dengan wilayah administrasi Kota Bima yang masih memiliki potensi terjadinya bencana terutama bencana banjir, maka Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan akan difokuskan terintegrasi dengan upaya pengurangan risiko bencana;
Masyarakat Agamais	<i>Misi Kelima :</i> Mewujudkan Masyarakat yang Berkarakter dan Agamais	Terwujudnya masyarakat yang memiliki keimanan dan ketqwaan yang baik, mematuhi aturan hukum negara dan agama, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama serta memiliki karakter individu dan komunitas yang bercirikan nilai agama melalui pemahaman dan pengamalan yang benar dan baik.

Sumber : RPJMD Kota Bima 2019-2023.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sebagaimana visi dan



misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut dirumuskan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bima 2018-2023 dan menetapkan sebanyak 6 (enam) tujuan dan 16 (enam belas) sasaran sebagaimana terlihat pada tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bima

Tujuan	Sasaran
<i>Misi Pertama : Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang Berdaya Saing;</i>	
Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan
	Meningkatnya Daya Beli masyarakat
	Meningkatnya ketahanan pangan
<i>Misi Kedua : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Produk Unggulan</i>	
Meningkatkan pemerataan Ekonomi masyarakat	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
	Menurunnya angka kemiskinan
	Meningkatnya kesempatan kerja
<i>Misi Ketiga : Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.</i>	
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan
	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
<i>Misi Keempat:</i> Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan Ramah, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana	
Meningkatkan Kualitas lingkungan hidup dan tata ruang	Meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang
	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup
Meningkatkan kualitas infrastruktur dan kawasan permukiman berbasis mitigasi bencana	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman
	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah
<i>Misi Kelima : Mewujudkan Masyarakat yang Berkarakter dan Agamais</i>	
Meningkatkan masyarakat yang tentram, bermoral dan agamais	Meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban
	Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal
	Meningkatnya pengamalan ajaran agama



B. Prioritas Daerah

Program pembangunan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan guna mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023. Untuk itu di rumuskan Prioritas Pembangunan Kota Bima sebagai berikut:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
4. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
5. Peningkatan Ekonomi Masyarakat
6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
7. Pemantapan Infrastruktur dan Perumahan Rakyat
8. Penanggulangan Bencana (PRB)
9. Budaya dan Kearifan Lokal berbasis nilai-nilai agama

C. Indikator Kinerja Utama Kota Bima

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja



Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran instansi pemerintah.

Pelaksanaan reviu terhadap sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kota Bima dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan terutama indikator yang diupayakan lebih baik dan berorientasi hasil. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kota Bima telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bima telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Bima Nomor : 51 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Bima Tahun 2019-2023, sebagaimana tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bima Tahun 2019-2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur
2.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	$\text{Indeks Pendidikan} = \frac{\text{IHLS} + \text{IRLS}}{2}$ <p><u>Keterangan :</u> IHLS : Indeks Harapan Lama Sekolah IRLS : Indeks Rata-Rata Lama Sekolah</p>
3.	Meningkatnya Daya Beli masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	$\frac{\text{Total pengeluaran Rumah Tangga}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}}$
4.	Meningkatnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan harapan	PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi
5.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB	$\frac{\text{PDRB}}{\text{Penduduk Pertengahan Tahun}} \times 100$
6.	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Tahun } n}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$
7.	Meningkatnya kesempatan kerja	Angka Pengangguran terbuka	$\frac{\text{Jumlah Pengangguran Terbuka Usia Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}} \times 100$
8.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Hasil Penilaian evaluasi akuntabilitas terhadap instansi Pemerintah Kota Bima oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		Skor LPPD	Hasil Penilaian dan evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bima
		Opini BPK	Penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah
9.	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio PAD terhadap APBD	$\frac{\text{Jumlah PAD Kota Bima}}{\text{Jumlah APBD}}$
10.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata-rata skor Indeks Kepuasan Masyarakat	$\text{Rata-rata IKM} = \frac{\text{Kumulatif IKM unit Pelayanan}}{\text{Jumlah Unit Pelayanan}}$
11.	Meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	Indeks Kesesuaian Tata Ruang	Angka perhitungan dari hasil overlay peta land use pada tahun berkenaan terhadap peta rencana pola ruang
12.	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	$\text{IKLH} = (\text{IPA} \times 30\%) + (\text{IPU} \times 30\%) + (\text{ITH} \times 40\%)$ Dimana: IKLH= Indeks kualitas lingkungan hidup IPA = Indeks kualitas air IPU = Indeks Kualitas Udara ITH = Indeks tutupan hutan
13.	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Luas kawasan kumuh	$\frac{\text{Luas Kawasan Kumuh}}{\text{Luas kawasan Perkotaan seluruhnya}} \times 100$
14.	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Persentase peningkatan infrastruktur daerah dalam kondisi baik	$\frac{(\text{Infrastruktur dalam kondisi baik tahun } n) - \text{infrastruktur dalam kondisi baik tahun } n-1}{\text{Infrastruktur dalam kondisi baik tahun } n-1} \times 100$
15.	Meningkatnya Ketahanan terhadap bencana	Indeks Ketangguhan Daerah	Angka kumulatif dari hasil pengukuran indeks prioritas dan indeks kapasitas daerah
16.	Meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban	Persentase penurunan Angka kriminalitas	$\frac{\text{Jumlah tindak kriminal tertangani dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 10.000$



D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bima Tahun 2019 mengacu pada dokumen RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019, dan dokumen Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2019. Pemerintah Kota Bima telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebagaimana terlihat pada tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bima Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Angka	69,55
2.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	10,39
3.	Meningkatnya Daya Beli masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	Rp.000/ bulan	1.200.000
4.	Meningkatnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan harapan	Angka	83,30
5.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB	%	5,80
6.	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	8,9



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
7.	Meningkatnya kesempatan kerja	Angka Pengangguran terbuka	%	3,75
8.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Huruf dan Angka	B (65,58)
		Skor LPPD	Angka	Sangat Tinggi (3,1930)
		Opini BPK	Huruf	WTP
9.	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio PAD terhadap APBD	%	6
10.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata-rata skor Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	B (78,58)
11.	Meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	Indeks Kesesuaian Tata Ruang	%	95
12.	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Angka	80
13.	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Luas kawasan kumuh	%	9,22
14.	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Persentase peningkatan infrastruktur daerah dalam kondisi baik	%	5
15.	Meningkatnya Ketahanan terhadap bencana	Indeks Ketangguhan Daerah	Angka	80
16.	Meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban	Persentase penurunan Angka kriminalitas	%	30

E. Program dan Anggaran

Untuk mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Kota Bima Tahun 2019 telah menetapkan program dan anggaran, sebagaimana terlihat pada tabel 2.6 berikut ini.

Tabel 2.6
Program dan Anggaran Tahun 2019

Sasaran		Anggaran
Sasaran 1 : Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat		35.253.978.620
1.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	7.022.078.010
2.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	818.318.950
3.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	2.542.746.000
4.	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	2.000.000.000
5.	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	16.151.332.760
6.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	882.844.000
7.	Kebijakan Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan dan Hukum Kesehatan	2.861.003.000
8.	Program Keluarga Bencana	2.236.552.400
9.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	330.951.500
10.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	408.152.000
Sasaran 2 : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan		36.663.491.453
1.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	5.669.412.000
2.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	28.524.613.500
3.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	561.567.003
4.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	491.327.000
5.	Program Pendidikan Non Formal	106.440.000
6.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	776.335.700
7.	Penyelamatan dan Pelestaria Dokumen/Arsip Daerah	144.029.750
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	34.985.000
9.	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	54.250.000
10.	Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak	300.531.500



Sasaran		Anggaran
Sasaran 3 : Meningkatnya daya beli masyarakat		1.542.040.300
1.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	280.815.000
2.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	244.282.000
3.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	186.223.200
4.	Program Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	296.979.900
5.	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	533.740.200
Sasaran 4 : Meningkatnya ketahanan pangan		11.199.806.264
1.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	881.593.664
2.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	10.318.212.600
Sasaran 5 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi		16.171.934.416
1.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	741.852.000
2.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	1.722.726.000
3.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2.316.382.500
4.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	3.708.487.416
5.	Program Pengembangan Industri dan Kemitraan Pariwisata	49.815.000,00
6.	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	605.785.800
7.	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	400.105.000
8.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	519.486.100
9.	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	847.380.600
10.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	3.519.432.000
11.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1.451.597.000
12.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	110.575.801
13.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	178.309.199



Sasaran		Anggaran
Sasaran 6 : Menurunnya angka kemiskinan		58.485.696.723
1.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (Kat) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1.131.925.000
2.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	610.472.000
3.	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	2.087.091.400
4.	Program Pengembangan Perumahan	770.178.000
5.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	12.128.394.822
6.	Program Peningkatan Pelayanan Kedaruratan dan Logistik	607.973.700
7.	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	39.250.834.801
8.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.898.827.000
Sasaran 7 : Meningkatnya kesempatan kerja		649.364.000
1.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	232.680.000
2.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	416.684.000
Sasaran 8 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah		23.552.745.901
1.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.812.451.826
2.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	215.815.000
3.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.592.914.816
4.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	7.327.046.202
5.	Program Peningkatan Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah	1.196.786.440
6.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.116.764.740
7.	Program Peningkatan Kompetensi Aparatur	1.766.559.000,00
8.	Program Pembangunan Sistem Informasi yang Terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian Kota Bima	364.936.000



Sasaran		Anggaran
9.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1.488.601.100
10.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.382.019.077
11.	Program Pengembangan E-Government dan Pelayanan TIK	1.288.851.700
Sasaran 9 : Meningkatnya kemandirian keuangan Daerah		10.610.128.900
1.	Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.680.380.500
2.	Peningkatan Layanan Perparkiran	435.567.000
3.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	7.494.181.400
Sasaran 10 : Meningkatnya kualitas pelayanan Public		21.557.069.000
1.	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	20.809.319.000
2.	Pengembangan dan Pengelolaan Terminal	120.200.000
3.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	627.550.000
Sasaran 11 : Meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang		1.355.942.500
1.	Program Perencanaan Tata Ruang	809.547.500
2.	Program Pemanfaatan Ruang	380.905.000
3.	Program Pengembangan Kawasan	165.490.000
Sasaran 12 : Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup		594.971.000
1.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	330.221.000
2.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam	264.750.000
Sasaran 13 : Meningkatnya kualitas kawasan permukiman		25.403.369.356
1.	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	4.646.143.500
2.	Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong	6.110.167.356
3.	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan	14.065.244.000
4.	Program Perencanaan Permukiman Kumuh	581.814.500



Sasaran		Anggaran
Sasaran 14 : Meningkatkan kualitas infrastruktur Daerah		57.527.402.653
1.	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	19.572.062.980
2.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	16.412.819.460
3.	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	431.547.000
4.	Program Pengembangan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa/Jaringan Pengairan	5.585.187.000
5.	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	9.369.805.213
6.	Program Peningkatan Sarana Prasarana Penerangan Jalan, Taman Dan Hutan Kota	5.897.731.000
7.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan	258.250.000
Sasaran 15 : Meningkatkan Ketahanan terhadap Bencana		1.844.221.300
1.	Program Kesiapsiagaan dan Pencegahan	1.151.442.300
2.	Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	692.779.000
Sasaran 16 : Meningkatkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban		5.129.202.900
1.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	557.985.000
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	2.178.196.500
3.	Program Pendidikan Politik Masyarakat	636.841.400
4.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1.330.692.000
5.	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	400.317.000
6.	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	25.171.000
Jumlah		307.541.365.286



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A kuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Pemerintah Kota Bima selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban melaksanakan penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bima yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014



tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, IKU Tahun 2018-2013, RKPD Tahun 2019, dan PK Tahun 2019.

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Pengukuran Kinerja Sasaran

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran Pemerintah Kota Bima. Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kota Bima tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun



2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Skala nilai peringkat kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagaimana tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber Permendagri 54 Tahun 2010

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan. Pada Tahun 2019 Pemerintah Kota Bima telah berusaha mewujudkan misi dan tujuannya melalui 16 sasaran dan 18 indikator kinerja dalam IKU maupun perjanjian kinerja tahun 2019. Kemudian telah dilakukan pengukuran kinerja sasaran sebagaimana tersaji pada tabel 3.2 berikut.



Tabel 3.2
Pengukuran Pencapaian Sasaran Pemerintah Kota Bima Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Angka	69,55	70,20	101
2.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	10,39	12,69	122
3.	Meningkatnya Daya Beli masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	Rp.000/hari	Rp. 1.200.000	Rp. 1.399.041	117
4.	Meningkatnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan harapan	Angka	83,30	85,5	103
5.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB	%	5,80	5,22	90
6.	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	8,9	8,60	103
7.	Meningkatnya kesempatan kerja	Angka Pengangguran terbuka	%	3,75	4,18	89
8.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Huruf dan Angka	B (65,58)	B (67,05)	102
		Skor LPPD	Angka	Sangat Tinggi (3,1930)	Sangat Baik (3,2595)	102
		Opini BPK	Huruf	WTP	WTP	100
9.	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio PAD terhadap APBD	%	6	5,58	93
10.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata-rata skor Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	B (78,58)	B (82,36)	104
11.	Meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	Indeks Kesesuaian Tata Ruang	%	95	98,1	103
12.	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Angka	80	83,84	104
13.	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Luas kawasan kumuh	%	9,22	6,23	127
14.	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Persentase peningkatan infrastruktur daerah dalam kondisi baik	%	5	4,21	84
15.	Meningkatnya Ketahanan terhadap bencana	Indeks Ketangguhan Daerah	Angka	80	84	105
16.	Meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban	Persentase penurunan Angka kriminalitas	%	30	33	152
Rata-rata						106



Adapun tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Bima pada Tahun 2019 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dalam tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Rekapitulasi Pencapaian Sasaran

No	Predikat Sasaran	Jumlah Sasaran	%
1.	Sangat Tinggi	13	81,25
2.	Tinggi	3	18,75
3.	Sedang	0	0
4.	Rendah	0	0
5.	Sangat Rendah	0	0
	Jumlah	16	100

Berdasarkan hasil analisis tersebut bahwa pada Tahun 2019 jumlah sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 16 sasaran, dengan rata-rata capaian kinerja 106 % dengan predikat sangat tinggi.

2. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran

a. Sasaran 1 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Untuk mengukur sasaran 1 : meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, diukur dengan menggunakan indikator kinerja yaitu Angka Harapan Hidup (AHH). Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Bima tahun 2019 sebesar 70,20, mengalami peningkatan sebesar 0,62 dibanding tahun 2018. Atas perolehan



nilai tersebut, Pemerintah Kota Bima telah berhasil mencapai target kinerja sebesar 101 % dari target RPJMD.

AHH adalah angka perkiraan lama hidup penduduk yang lahir pada suatu daerah. Oleh karena itu AHH Kota Bima sebesar 70,20 memiliki arti bahwa setiap bayi yang lahir di Kota Bima pada tahun 2019 mempunyai harapan hidup hingga berusia 70 tahun dan 2 bulan. Adapun analisis pencapaian sasaran 1 dapat dilihat tabel 3.4 berikut.

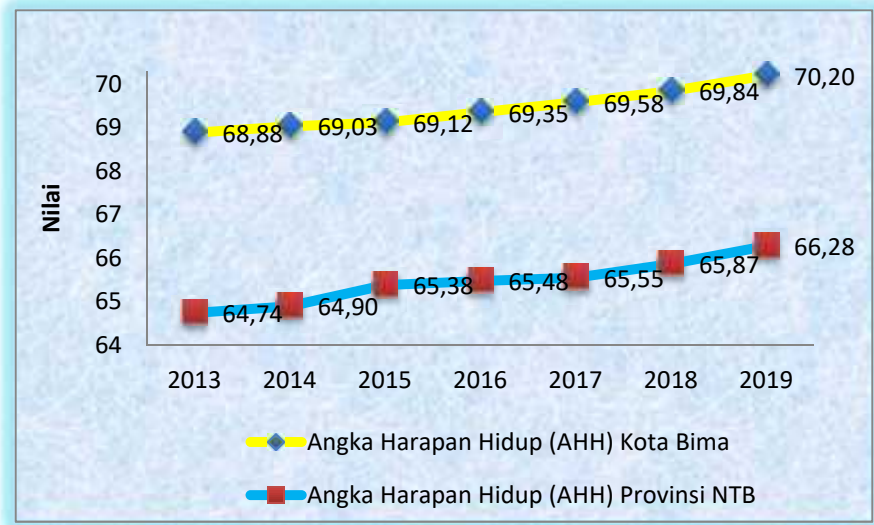
Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 1

Sasaran Strategis 1	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)
		Target	Realisasi	
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	69,55	70,20	101

Kecenderungan setiap tahun bahwa AHH Kota Bima selalu mengalami peningkatan dan unggul diatas AHH NTB. Pada tahun 2019 AHH Kota Bima unggul diatas AHH Provinsi NTB sebesar 3,64 poin sehingga anak yang lahir di Kota Bima pada tahun 2019 mempunyai harapan hidup tambahan 3 tahun 7 bulan dibanding penduduk yang ada di Provinsi NTB secara umum, perbandingan AHH Kota Bima dengan NTB dapat dilihat pada grafik 3.1 berikut ini.



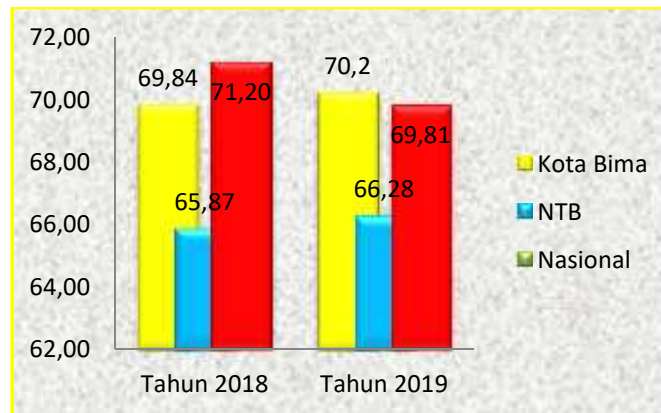
Grafik 3.1
Perbandingan AHH Kota Bima dengan NTB



Grafik 3.1 diatas memperlihatkan tren peningkatan AHH Kota Bima dari tahun 2013 hingga 2019 setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Tingginya kesadaran masyarakat Kota Bima yang didukung oleh semakin membaiknya kemampuan ekonomi masyarakat serta didukung juga oleh peningkatan kualitas sarana kesehatan oleh Pemerintah dan masyarakat.

Kota Bima merupakan daerah yang memiliki AHH tertinggi kedua setelah Kota Mataram untuk seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi NTB. Kemudian jika dibanding dengan AHH nasional bahwa AHH Kota Bima masih berada dibawah AHH nasional yang telah mencapai 71,20 atau selisih 0,39 poin. Secara rinci perbandingan Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Bima dengan Provinsi dan Nasional dapat dilihat grafik 3.2 berikut.

Grafik 3.2
Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota Bima
dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2019



Faktor pendukung pencapaian kinerja, meliputi meningkatnya komitmen Pemerintah Kota Bima dalam mendorong program peningkatan pelayanan pada urusan kesehatan, baik peningkatan sarana dan prasarana, SDM, dan anggaran, sedangkan **hambatan dalam pencapaian kinerja** berupa masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana kesehatan dan terbatasnya tenaga kesehatan (khususnya dokter spesialis). **Solusi** untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kedepannya melalui pengusulan formasi bagi dokter spesialis dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang ada pada RSUD maupun Puskesmas.

b. Sasaran 2 : Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan.

Untuk mengukur sasaran 2 : meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan, diukur dengan menggunakan indikator



kinerja yaitu Indeks Pendidikan. Indeks Pendidikan Kota Bima pada tahun 2019 sebesar 12,69 atau peningkatan 0,13 poin dibanding tahun 2018. Atas perolehan tersebut, Pemerintah Kota Bima telah mampu mencapai kinerja sebesar 122 % dari target sebesar 10,39 pada RPJMD. Analisis pencapaian indikator kinerja sasaran 2 dapat dilihat tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5
Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 2

Sasaran 2	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)
		Target	Realisasi	
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan.	Indeks Pendidikan	10,39	12,69	122

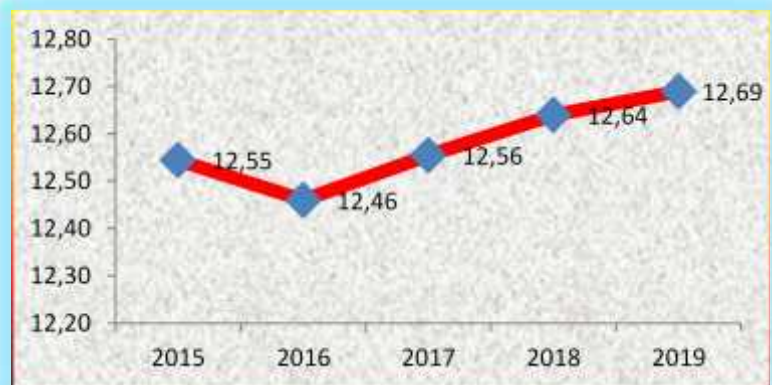
Selanjutnya analisis perbandingan dengan Kabupaten/Kota se NTB, Kota Bima berada pada peringkat tertinggi. Selain itu indeks pendidikan Kota Bima telah melampaui Indeks Pendidikan Provinsi NTB maupun Nasional. Untuk rincian perbandingan tersebut dapat dilihat pada grafik 3.3. Untuk kurun waktu selama 5 (lima) tahun pada periode 2015-2019 bahwa rata-rata indeks pendidikan di Kota Bima sebesar 12,58. Indeks pendidikan 2019 merupakan indeks pendidikan yang tertinggi untuk seluruh kabupaten/kota di NTB, untuk lebih jelasnya dapat melihat grafik 3.3 dan 3.4 berikut.

Grafik 3.3
Perbandingan Indeks Pendidikan Kota Bima
dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2019



Sumber :BPS, Kondisi Per September 2019

Grafik 3.4
Perbandingan Indeks Pendidikan Kota Bima
selama tahun 2015-2019



Faktor pendukung pencapaian kinerja, meliputi meningkatnya komitmen kepala daerah dalam membangun pendidikan di daerah, baik sarana prasarana, SDM, anggaran, sedangkan **hambatan dalam pencapaian kinerja** berupa masih



lemah kualitas SDM pendidikan dan sarana prasarana. **Solusi** untuk meningkatkan indeks pendidikan untuk kedepannya, perlu meningkatkan SDM dan Sarana Prasarana Pendidikan.

c. Sasaran 3 : Pengeluaran Perkapita

Untuk mengukur sasaran 3 : meningkatnya daya beli masyarakat, diukur dengan menggunakan indikator kinerja yaitu Pengeluaran Perkapita sebulan adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu terakhir, sedangkan konsumsi bukan makanan dihitung sebulan dan setahun terakhir. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan.

Angka konsumsi/pengeluaran rata-rata per kapita yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga (baik mengonsumsi makanan maupun tidak) terhadap jumlah penduduk. Pengeluaran perkapita penduduk Kota Bima pada tahun 2019 sebesar Rp.1.399.041/bulan. Atas perolehan tersebut, maka Pemerintah Kota Bima telah mampu mencapai kinerja sebesar 117 % dari target



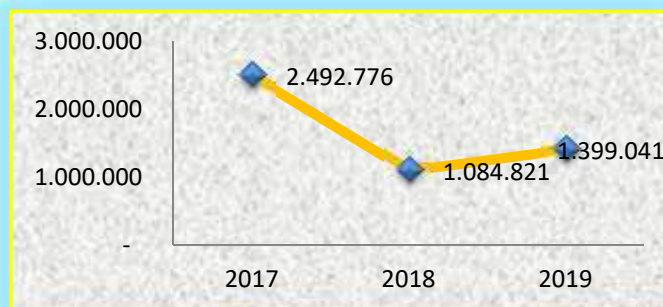
sebesar Rp.1.200.000./bulan pada RPJMD. Analisis pencapaian indikator kinerja sasaran 3 dapat dilihat tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 3

Sasaran 3	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)
		Target	Realisasi	
Meningkatnya Daya Beli masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	Rp.1.200.000	Rp.1.399.041	117

Pada tahun 2019, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk Kota Bima diperoleh dari pengeluaran makanan sebesar Rp. 680.390 dan pengeluaran non makanan sebesar Rp.718.651. Atas kondisi tersebut, maka pengeluaran penduduk di Kota Bima tahun 2019 masih didominasi oleh konsumsi non makanan sebesar 51,37 %. Jika dibanding tahun 2018 pengeluaran perkapita penduduk Kota Bima meningkat, sebagaimana terlihat grafik 3.5 dan 3.6 berikut.

Grafik 3.5
Perbandingan Pengeluaran Perkapita/bulan
Penduduk Kota Bima Tahun 2017- 2019



Grafik 3.6
Perbandingan Pengeluaran Perkapita/bulan
Penduduk Kota Bima dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2019



Berdasarkan grafik diatas bahwa pengeluaran perkapita/bulan penduduk Kota Bima sudah berada diatas rata-rata Provinsi dan rata-rata nasional. Berkenaan dengan hal tersebut, maka kemampuan ekonomi penduduk Kota Bima jauh lebih baik dari penduduk NTB dan Indonesia secara umum.

Faktor pendukung pencapaian kinerja, meliputi meningkatnya kemajuan Kota Bima, terutama sektor perbankan, UMKM, dan jasa. sedangkan **hambatan dalam pencapaian kinerja** berupa masih belum optimalnya pengembangan produk unggulan daerah, terutama peningkatan kualitas dan promosi hasil olahan lokal sehingga produk unggulan daerah menjadi kalah bersaing dengan produk daerah lain. **Solusi** untuk meningkatkan nilai produk unggulan daerah adalah melalui peningkatan kualitas produk dan pemasaran yang lebih luas dengan menggunakan teknologi informasi.



d. Sasaran 4 : Meningkatnya Ketahanan Pangan

Untuk mengukur sasaran 4 : meningkatnya ketahanan pangan, diukur dengan menggunakan indikator kinerja yaitu skor Pola Pangan Harapan (PPH). Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas serta kualitas konsumsi pangan, diperlukan target pencapaian angka ketersediaan pangan perkapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizinya. Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XI tahun 2014 merekomendasikan kriteria ketersediaan pangan ditetapkan minimal 2.400 kkal/kapita/hari untuk energi dan minimal 63 gram/kapita/hari untuk protein.

Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari 3 sumber, yaitu: 1) produksi dalam negeri; 2) pemasokan pangan; 3) pengelolaan cadangan pangan. Ketersediaan pangan dapat diamati pada berbagai tingkatan mencakup rumah tangga. Penyediaan pangan yang sesuai dengan kebutuhan gizi penduduk, baik jumlah maupun mutunya merupakan harapan setiap upaya pemenuhan kebutuhan pangan.



Skor PPH berdasarkan proporsi sumbangan energi. Kelompok bahan makanan PPH meliputi: padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah dan biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah serta lain-lain. Jenis pangan dikelompokkan menjadi sembilan yaitu: padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, serta lain-lain. Penilaian Skor PPH dikategorikan menjadi empat, yaitu: sangat rendah (<55%), rendah (55-69%), cukup (70-84%) dan baik ($\geq 85\%$). Susunan Skor Pola Pangan Harapan Kota Bima Tahun 2019 disajikan pada tabel 3.7 berikut.

Tabel. 3.7.
Perhitungan PPH Ketersediaan
Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2019

No.	Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori)	% AKE	Bobot	Skor riil	Skor PPH	Skor Maks
1.	Padi-padian	1.718,86	72,96	0,5	36,48	25,5	25,0
2.	Umbi-umbian	1,70	2,84	0,5	1,42	1,4	2,5
3.	Pangan Hewani	686,10	31,19	2,0	62,37	24,0	24,0
4.	Minyak dan Lemak	18,97	4,47	0,5	2,24	2,2	5,0
5.	Buah/biji berminyak	1,43	0,07	0,5	0,03	1,0	1,0
6.	Kacang-kacangan	7,80	0,35	2,0	0,71	10,0	10,0
7.	Gula	105,56	4,80	0,5	2,40	0,4	2,5
8.	Sayuran dan buah	31,58	1,44	5,0	7,18	21,0	30,0
	Jumlah	2.572	118,11		112,83	85,5	100

Sumber : Dinas ketahanan Pangan Kota Bima



Skor Pola Pangan Harapan Kota Bima pada tahun 2019 sebesar 85,5. Atas perolehan tersebut, maka Pemerintah Kota Bima telah mampu mencapai kinerja sebesar 103 % dari target sebesar 83,30 pada RPJMD. Analisis pencapaian indikator kinerja sasaran 4 dapat dilihat tabel 3.8 berikut.

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 4

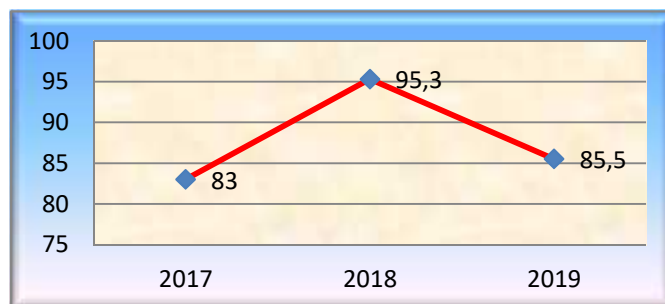
Sasaran 4	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)
		Target	Realisasi	
Meningkatnya ketahanan pangan	Skor pola pangan harapan	83,30	85,5	103

Bahwa capaian PPH Kota Bima masih dibawah target nasional 90 %, namun masih termasuk dalam kategori baik. Hal ini disebabkan karena masih tingginya tingkat konsumsi beras masyarakat yang memberikan kontribusi terbesar untuk rendahnya PPH Kota Bima yang digambarkan dari ketersediaan energi. Dimana target energi yang disumbangkan dari padi padian sebesar 1.000 kkal Kota Bima sudah mencapai 1.718,86 kkal, sebanyak 718,86 kkal menekan hampir separoh energi yang seharusnya disumbangkan oleh kedelapan kelompok pangan yang lain yang hanya 1.000 kkal untuk mencapai target konsumsi 2000 kkal/orang/hari. Sementara umbi-umbian masih sangat jauh dari harapan dari target yang harus dipenuhi sebesar 120 kkal



hanya terpenuhi sebesar 1,70 kkal masih terdapat gap sebesar 118,3 kkal, dibanding kelompok pangan yang lain, demikian juga dengan kelompok pangan minyak dan lemak, Buah/biji berminyak, kacang-kacangan dan sayuran dan buah masih berada dibawah standar ketersediaan energi. Jika dilihat dari Skor PPH atau tingkat keragaman ketersediaan pangan yang ada di Kota Bima pada tabel 3.7 diatas bahwa kelompok pangan yang masih dibawah standar minimal meliputi umbi-umbian, minyak dan lemak, gula, sayuran dan buah. Keragaman sayur dan buah relatif kurang, selain pada sisi produksi dan harga yang relatif tinggi. Skor Pola Pangan Harapan untuk ketersediaan energi ditahun 2019 terealisasi 2.572 kkal/kapita/hari, artinya sudah memenuhi standar minimal 2.400 kkal/kapita/hari menurut Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XI tahun 2014. Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan Kota Bima Tahun 2017-2019 sebagaimana terlihat pada grafik 3.7 berikut.

Grafik 3.7
Skor PPH Kota Bima tahun 2017-2019





Berdasarkan analisis angka PPH Kota Bima selama 3 tahun terakhir bahwa capaian tertinggi pada tahun 2018, kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 9,8 poin. Pada tahun 2018 ketersediaan pangan untuk 9 (Sembilan) bahan pangan sangat cukup atau baik, hal ini dikarenakan tingkat keragaman ketersediaan pangan dan tingkat distribusi serta penyebaran pangan tersebut cukup merata dilihat dari angka kecukupan energi 1.77%.

Salah satu faktor cukup signifikannya penurunan PPH ketersediaan di tahun 2019 adalah perhitungan PPH ketersediaan di tahun 2018 menggunakan AKE 2.200 Kkal/kap/hari, sedangkan di tahun 2019 menggunakan AKE 2.400 berdasarkan hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG). Disamping itu di tahun 2018 terdapat agenda nasional yang cukup signifikan yaitu pesta rakyat dalam rangka pemilihan kepala daerah dalam hal ini Walikota Bima dan Wakil Walikota Bima.

Skor AKE di Kota Bima sebenarnya cukup tinggi yang dicerminkan nilai skor AKE 118,11% atau sudah memenuhi standar maksimal yaitu 100%. Akan tetapi, keseimbangan dan keragaman ketersediaan pangan yang ditunjukkan Skor PPH ketersediaan



sebesar 85,5% dari kondisi sempurna (angka ideal atau sempurna=100).

Faktor pendukung pencapaian kinerja adalah ketersediaan pangan dan tingkat distribusinya cukup merata. sedangkan **hambatan dalam pencapaian kinerja** berupa masih kurang tingkat keragaman ketersediaan pangan. **Solusi** untuk meningkatkan skor PPH diperlukan intervensi program edukasi dan promosi diversifikasi pangan, pemanfaatan pekarangan melalui Kelompok Rumah Pangan Lestari (KRPL).

e. Sasaran 5 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi

Untuk mengukur sasaran 5 : meningkatnya pertumbuhan ekonomi, diukur dengan menggunakan indikator kinerja yaitu pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.



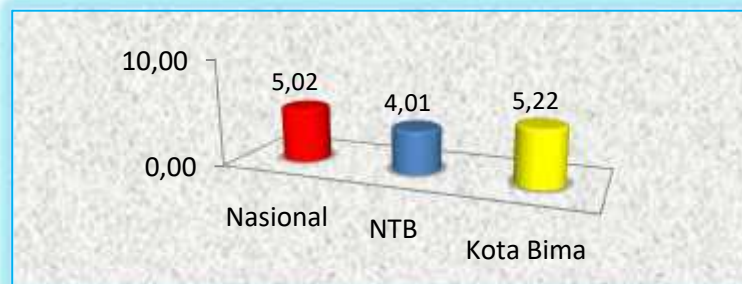
Pertumbuhan PDRB Kota Bima pada tahun 2019 sebesar 5,22. Atas perolehan tersebut, maka Pemerintah Kota Bima telah mampu mencapai kinerja sebesar 90 % dari target sebesar 5,80 pada RPJMD. Analisis pencapaian indikator kinerja sasaran 5 dapat dilihat tabel 3.9 berikut.

Tabel 3.9
Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 5

Sasaran 5	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)
		Target	Realisasi	
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan PDRB	5,80	5,22	90

Jika dibanding tahun 2018 pertumbuhan PDRB Kota Bima meningkat sebesar 0,48 poin. Selanjutnya pertumbuhan PDRB Kota Bima sudah berada diatas rata-rata Provinsi NTB dan nasional. Berkenaan dengan hal tersebut, maka pertumbuhan PDRB Kota Bima jauh lebih baik dari Provinsi NTB dan Nasional, sebagaimana tersaji pada grafik 3.8 berikut.

Grafik 3.8
Perbandingan Pertumbuhan PDRB Kota Bima Provinsi NTB dan Nasional tahun 2019





Berdasarkan analisis terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional bruto Atas Harga Konstan 2010 menurut lapangan usaha tahun 2019 bahwa jasa pendidikan merupakan yang tertinggi sebesar 7,56, sedangkan administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebagai yang terendah dengan nilai sebesar 1,07. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut.

Tabel 3.10
Pertumbuhan Produk Domestik Regional bruto Atas Harga Konstan 2010 menurut lapangan usaha tahun 2019

No	Lapangan Usaha	Nilai
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/	3,62
2.	Pertambangan dan Penggalian/	4,72
3.	Industri Pengolahan	4,52
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	7,46
5.	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	3,43
6.	Konstruksi	4,24
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,13
8.	Transportasi dan Pergudangan	6,18
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,61
10.	Informasi dan Komunikasi	5,93
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,97
12.	Real Estate	5,89
13.	Jasa Perusahaan	4,18
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1,07
15.	Jasa Pendidikan	7,56
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/	5,25
17.	Jasa Lainnya/	6,35
Produk Domestik Bruto		5,22



Faktor pendukung pencapaian kinerja, meliputi meningkatnya kemajuan Kota Bima, terutama sektor perbankan, UMKM, dan jasa. sedangkan **hambatan dalam pencapaian kinerja** berupa masih belum optimalnya pengembangan produk unggulan daerah, terutama peningkatan kualitas dan promosi hasil olahan lokal sehingga produk unggulan daerah menjadi kalah bersaing dengan produk daerah lain. **Solusi** untuk meningkatkan nilai produk unggulan daerah melalui pembinaan pelaku usaha, peningkatan kualitas produk dan pemasaran yang lebih luas dengan menggunakan teknologi informasi.

f. Sasaran 6 : Menurunnya angka kemiskinan

Untuk mengukur sasaran 6 : menurunnya angka kemiskinan, diukur dengan menggunakan indikator kinerja yaitu angka kemiskinan. Berdasarkan data BPS yang dirilis September 2019 bahwa persentase penduduk miskin di Kota Bima sebesar 8,60 % sehingga terjadi penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,19 dibanding tahun 2018. Atas perolehan tersebut, maka Pemerintah Kota Bima telah mampu mencapai target kinerja RPJMD sebesar 103 % dari target sebesar 8,90, analisis pencapaian indikator kinerja sasaran 6 dapat dilihat tabel 3.11 berikut.

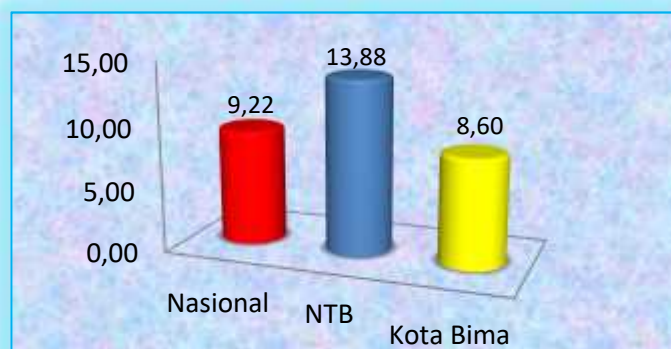


Tabel 3.11
Analisis Pencapaian Sasaran 6

Sasaran 6	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)
		Target	Realisasi	
Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	8,90	8,60	103 %

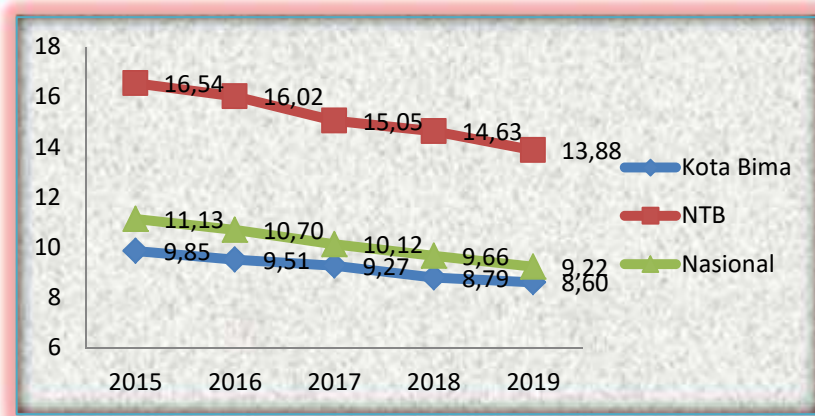
Saat ini persentase penduduk miskin Kota Bima merupakan yang terendah diantara kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat dan jika dibanding Provinsi NTB maka Pemerintah Kota Bima lebih baik dalam menekan persentase penduduk miskin sebesar 4,66 % dari Provinsi NTB. Kemudian jika dibanding dengan nasional, maka Pemerintah Kota Bima lebih mampu mengurangi persentase penduduk miskin sebesar 0,62 %, sebagaimana tersaji pada grafik 3.9 berikut.

Grafik 3.9
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kota Bima dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2019



Selanjutnya apabila dilakukan perbandingan persentase penduduk miskin beberapa tahun sebelumnya, maka persentase penduduk miskin pada tahun 2019 merupakan yang terendah sepanjang dibentuknya Pemerintah Kota Bima, data perbandingan tersebut terlihat pada grafik 3.10 berikut ini.

Grafik 3.10
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin di Kota Bima dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2015 – 2019



Faktor pendukung pencapaian kinerja, meliputi meningkatnya komitmen kepala daerah untuk melaksanakan program penanganan kemiskinan yang terintegrasi, baik perencanaan dan pelaksanaannya, sedangkan **hambatan dalam pencapaian kinerja** berupa masih lemah aspek koordinasi dalam pendataan dan verifikasi data kemiskinan di daerah sehingga menghambat pelayanan. **Solusi** untuk meningkatkan kualitas data yang valid diperlukan penyamaan persepsi antara



Pemerintah Kota Bima dengan seluruh pihak yang terlibat (*stakeholders*) dalam penanggulangan kemiskinan di daerah.

g. Sasaran 7 : Tingkat Pengangguran Terbuka

Untuk mengukur sasaran 7 : meningkatnya kesempatan kerja, diukur dengan menggunakan indikator kinerja yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT menggambarkan perbandingan jumlah penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha dan penduduk yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja terhadap angkatan kerja.

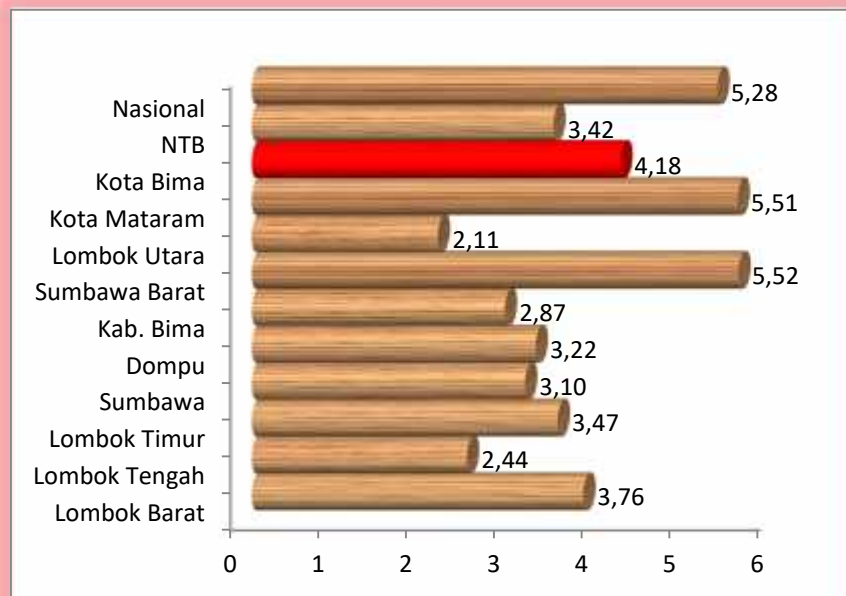
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bima tahun 2019 sebesar 4,18 atau naik sebesar 1,79 dibanding tahun 2018. Atas perolehan tersebut, maka Pemerintah Kota Bima berhasil mencapai target kinerja sebesar 89 % dari target RPJMD sebesar 3,75 %. Analisis pencapaian indikator kinerja sasaran 7 dapat dilihat tabel 3.12 berikut.

Tabel 3.12
Pencapaian Indikator Sasaran 7

Sasaran 7	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)
		Target	Realisasi	
Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,75	4,18	89

Dengan melaksanakan analisa perbandingan dengan beberapa Kabupaten/Kota lainnya di NTB dapat dilihat pada grafik 3.11 diatas. Pada tahun 2019 bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bima merupakan yang tertinggi ketiga dari seluruh Kabupaten/Kota di NTB, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bima lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi NTB, namun masih berada dibawah rata-rata nasional dengan angka TPK sebesar 5,28, sebagaimana terlihat pada grafik 3.11 berikut.

Grafik 3.11
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaaten/Kota,Provinsi dan Nasional Tahun 2019



Faktor pendukung pencapaian kinerja, meliputi meningkatnya komitmen Pemerintah Kota Bima dalam



mendorong program perluasan lapangan kerja, membangun kelembagaan dan sarana prasarana ketenagakerjaan, seperti membentuk Dinas Tenaga Kerja dan Balai Latihan Kerja (BLK). Sedangkan **hambatan** dalam pencapaian kinerja berupa BLK masih belum dilaksanakan pengisian struktural sehingga menghambat peningkatan ketrampilan masyarakat pencari kerja. **Solusi** untuk meningkatkan pelayanan ketenagakerjaan kedepannya melalui peningkatan SDM dan sarana prasarana ketenagakerjaan.

h. Sasaran 8 : Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Sasaran 8 yaitu menghadirkan penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, diukur dengan menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu; (1) Nilai SAKIP; (2) LPPD dan (3) Opini BPK. Adapun hasil pengukuran dapat dilihat pada tabel 3.13 berikut.

Tabel 3.13
Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 8

Sasaran 8	Indikator Kinerja	2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)
		Target	Realisasi	
Meningkatya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	B (65,58)	B (67,05)	102
	Nilai LPPD	Sangat Tinggi (3,1930)	Sangat Tinggi (3,2595)	102
	Opini BPK	WTP	WTP	100



Selanjutnya analisis capaian pada masing-masing indikator kinerja dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1) Indikator Kinerja Sasaran SAKIP

Perolehan nilai SAKIP Pemerintah Kota Bima Tahun 2019 sebesar 67,05 dengan predikat kategori nilai baik (B). Nilai SAKIP yang diukur merupakan pelaksanaan anggaran 2018, tetapi dilaporkan pada tahun 2019 oleh Kota Bima kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Untuk Tahun 2019 bahwa nilai SAKIP Kota Bima merupakan yang tertinggi untuk 10 Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan nilai tersebut, maka capaian kinerja Pemerintah Kota Bima untuk indikator kinerja sasaran SAKIP yaitu sebesar 102 %. Untuk analisis pencapaian kinerja Nilai SAKIP dapat dilihat pada tabel 3.14 berikut.

Tabel 3.14
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Nilai SAKIP

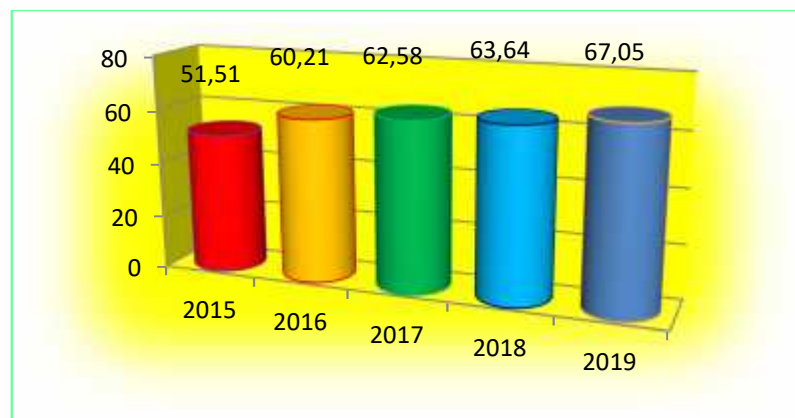
Indikator Kinerja	2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)
	Target	Realisasi	
Nilai SAKIP	B (65,58)	B (67,05)	102

Berdasarkan realisasi capaian tersebut, maka kinerja Pemerintah Kota Bima pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 3,41 poin dibanding Tahun 2018. Hasil



penilaian tersebut mencerminkan bahwa akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bima mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Rata-rata peningkatan nilai SAKIP Pemerintah Kota Bima setiap tahun untuk kurun waktu 2015-2019 sebesar 3,1 poin, sebagaimana terlihat pada grafik 3.12 berikut ini.

Grafik 3.12
Perolehan Nilai SAKIP Pemerintah Kota Bima
Tahun 2015-2019



Jika dibandingkan perolehan nilai SAKIP 2018 dengan nilai SAKIP tahun 2019 berdasarkan pada masing-masing indikator utama penilaian SAKIP, maka adanya peningkatan nilai SAKIP pada seluruh indikator, baik aspek perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja, sebagaimana terlihat pada tabel 3.15 berikut.



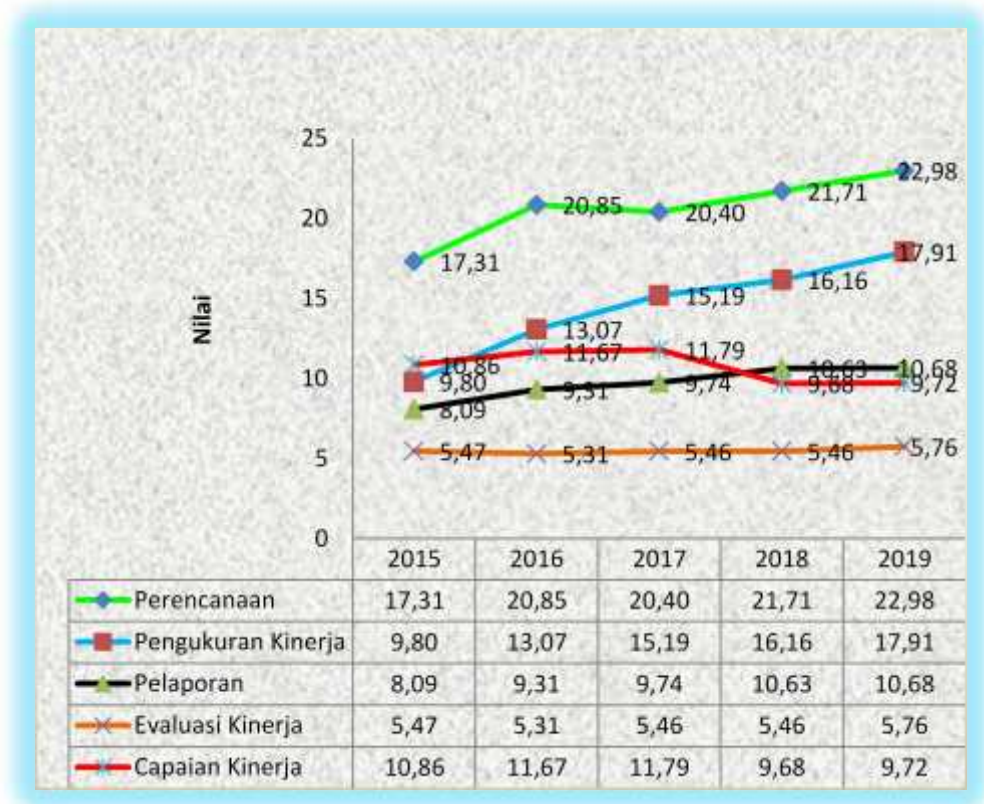
Tabel 3.15
Perbandingan Nilai SAKIP Kota Bima Tahun 2018-2019

Indikator	2018	2019	Laju Pertumbuhan
Perencanaan	21,71	22,98	1,27
Pengukuran Kinerja	16,16	17,91	1,75
Pelaporan	10,63	10,68	0,05
Evaluasi Kinerja	5,46	5,76	0,3
Capaian Kinerja	9,68	9,72	0,04
Rata-rata	63,64	67,05	3,41

Berdasarkan analisis tersebut bahwa sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bima telah berada dalam kondisi yang baik, meskipun masih perlu peningkatan kualitas sistem yang didukung oleh modifikasi atau inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi secara online. Selain itu pada aspek evaluasi kinerja perlu adanya peningkatan kembali karena mengalami penurunan sebesar 2,07 poin jika dibanding pencapaian pada Tahun 2017 sebesar 11,79. Selanjutnya rincian perolehan nilai pada masing-masing indikator SAKIP dapat dilihat pada grafik 3.13 berikut.



Grafik 3.13
Perolehan Nilai SAKIP Kota Bima
Menurut Indikator Penilaian sejak Tahun 2015-2019



Faktor pendukung pencapaian kinerja, meliputi meningkatnya komitmen kepala daerah dan perangkat daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah, sedangkan **hambatan dalam pencapaian kinerja** berupa masih lemah aspek koordinasi dalam penggunaan aplikasi pada setiap pelayanan sehingga menghambat akuntabilitas kinerja lingkup Pemerintah Kota Bima secara transparan. **Solusi** untuk meningkatkan



akuntabilitas kinerja lingkup Pemerintah Kota Bima adalah melalui pembangunan berbasis teknologi informasi, baik perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

2) Indikator Sasaran LPPD

LPPD merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Berdasarkan hasil evaluasi EKPPD Tahun 2019 yang merupakan hasil EKPPD tahun 2018 oleh Tim Provinsi bersama BPKP Nomor LHE-493/PW23/3/2019, Tanggal 30 Agustus 2019 bahwa LPPD Pemerintah Kota Bima tahun 2018 memperoleh skor 3,2595 dengan kategori Prestasi Sangat Tinggi. Adapun analisis capaian indikator kinerja nilai LPPD Tahun 2019 sebagaimana pada tabel 3.16 berikut.

Tabel 3.16
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Nilai LPPD

Indikator Kinerja	2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)
	Target	Realisasi	
Nilai LPPD	Sangat Tinggi (3,1930)	Sangat Tinggi (3,2595)	102

Atas pencapaian tersebut telah menempatkan status kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada urutan ke 4 (keempat) dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota se Nusa



Tenggara Barat. Jika dianalisis perolehan nilai selama 6 tahun terakhir bahwa nilai LPPD Kota Bima cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Sejak tahun 2013 Kota Bima telah memperoleh nilai 2,5671 dengan predikat baik, lalu tahun 2014 naik sebanyak 0,3045 poin, tahun 2015 naik 0,1550 poin, tahun 2016 naik menjadi 3,1654, meskipun pada tahun 2017 sempat turun sebesar 0,1698 dibanding tahun 2016. kemudian meningkat kembali pada tahun 2018 sebesar 0,2641 poin, secara rinci perolehan LPDD selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.17 berikut ini.

Tabel 3.17
Nilai LPPD Pemerintah Kota Bima
Selama Tahun 2015 - 2018

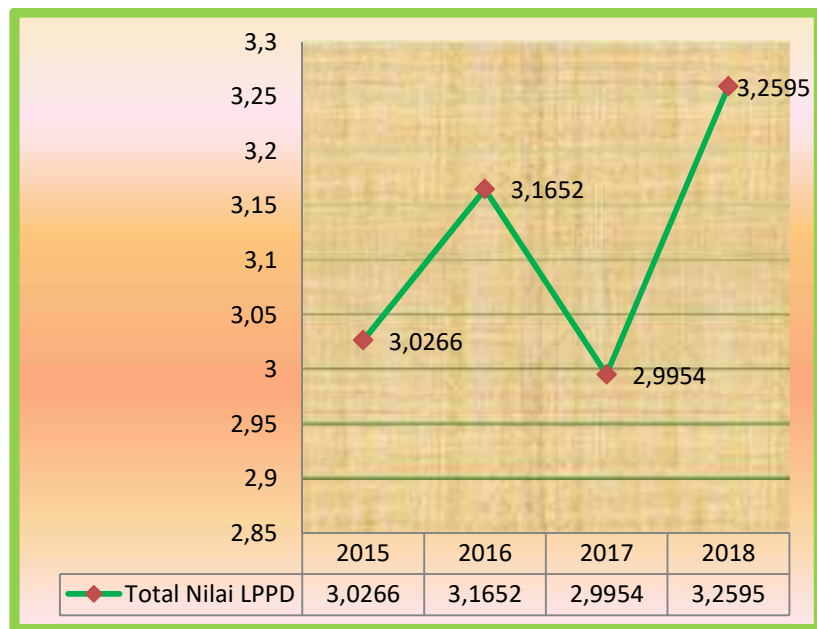
Tahun	Predikat	Nilai	Laju Pertumbuhan
2013	Baik	2,5671	-
2014	Baik	2,8716	0,3045
2015	Sangat Baik	3,0266	0,1550
2016	Sangat Baik	3,1652	0,1386
2017	Baik	2,9954	- 0,1698
2018	Sangat Baik	3,2595	0,2641

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja tahun 2019 bahwa Pemerintah Kota Bima telah mampu mencapai kinerja sebesar 102% dari target RPJMD. Perolehan nilai Tahun 2019 merupakan perolehan kinerja



tertinggi, jika dibanding perolehan nilai 3 (tiga) tahun sebelumnya, Atas perolehan tersebut menunjukkan adanya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Kota Bima, selanjutnya daftar perolehan nilai selama 4 tahun dapat dilihat pada grafik 3.14 berikut.

Grafik 3.14
Perolehan Nilai LPPD Pemerintah Kota Bima
Selama Tahun 2015-2018



Faktor pendukung pencapaian kinerja, meliputi meningkatnya komitmen kepala daerah dan perangkat daerah dalam melaksanakan pelayanan terhadap seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, sedangkan **hambatan dalam pencapaian kinerja** yaitu masih rendah pencapaian beberapa Indikator Kinerja Kunci (IKK) sehingga



menghambat pencapaian kinerja Pemerintah Kota Bima.

Solusi untuk kedepan Pemerintah Kota Bima perlu melakukan perbaikan perencanaan dan inovasi pelayanan guna meningkatkan pencapaian kinerja yang lebih baik.

3) Indikator Sasaran Opini BPK

Opini BPKP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang memenuhi kriteria antara lain :

- a) Laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.
- b) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Daerah atas pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik.
- c) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping ketiga kriteria utama tersebut LKPD yang disajikan harus didukung dengan bukti-bukti audit yang mencukupi, tidak terdapat ketidakpastian dan kesalahan yang cukup berarti (*no material uncertainties*), pengelolaan atas *Cash flow* dikontrol dengan baik, dan pengelolaan atas aset daerah dilengkapi dengan bukti-bukti administrasi yang lengkap. Artinya, laporan keuangan yang disajikan



telah bebas dari kesalahan- kesalahan atau kekeliruan yang material.

Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan NTB terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Bima yang dikeluarkan pada tahun 2019 merupakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah Kota Bima tahun 2018 diperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sehingga sesuai dengan target. Status opini dari BPK terhadap hasil pemeriksaan LKPD Kota Bima menandakan semakin baiknya pengelolaan keuangan pemerintah Kota Bima dari tahun ke tahun. Adapun pencapaian opini BPK terhadap LKPD tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel 3.18 berikut.

Tabel 3.18
Pencapaian Opini BPK terhadap LKPD Pemerintah Kota Bima tahun 2014-2018

Tahun	Predikat	Nilai	Capaian Kinerja (%)
2014	WTP	WTP	100
2015	WTP	WTP	100
2016	WTP	WTP	100
2017	WTP	WTP	100
2018	WTP	WTP	100

Sumber : Inspektorat Kota Bima



Pemerintah Kota Bima meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang. Dengan demikian target RPJMD sampai tahun 2018 telah tercapai 100%. Faktor yang mendukung capaian hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD Kota Bima adalah sebagai berikut :

- 1) Komitmen yang sangat tinggi kepala daerah dan seluruh jajaran Pemerintah Kota Bima dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah ke arah yang lebih baik;
- 2) Pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan LKPD bekerja sama dengan BPKP perwakilan NTB;
- 3) Pengelolaan keuangan dan aset daerah didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi, seperti aplikasi SIMDA dan SIMBADA.

Adapun upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Bima untuk meningkatkan capaian kinerja opini hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Kota Bima pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- 1) Memperbaiki kelemahan sistem pengendalian internal dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah;



- 2) Memperbaiki pengelolaan Aset Daerah;
- 3) Memperbaiki sistem penganggaran dan realisasi belanja, agar tidak terjadi salah penganggaran dan salah realisasi belanja;
- 4) Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program yang dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja opini pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan, yaitu :

- 1) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capai kinerja dan keuangan, dengan kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan;
- 2) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

i. Sasaran 9 : Meningkatnya kemandirian keuangan

Sasaran 9 yaitu meningkatnya kemandirian keuangan, diukur dengan indikator kinerja rasio PAD terhadap APBD. Pada tahun 2019 Pemerintah Kota Bima memperoleh PAD sebesar Rp.50.472.550.773,75 atau 5,58 % dari APBD sebesar Rp.904.704.579.725,85. Sejak terbentuknya Pemerintah Kota Bima, bahwa perolehan PAD Tahun 2019 sebagai capaian yang tertinggi dibanding beberapa tahun sebelumnya. Berdasarkan



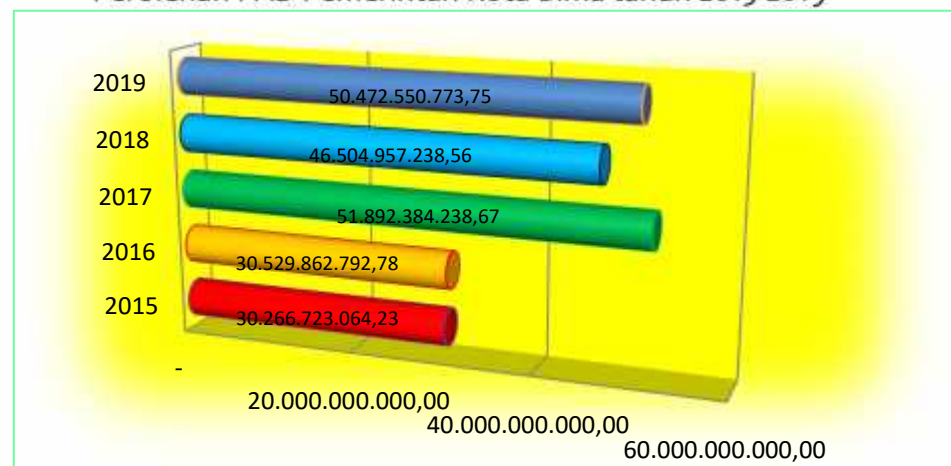
PAD tersebut, maka capaian kinerja Pemerintah Kota Bima untuk indikator kinerja sasaran Rasio PAD terhadap APBD yaitu sebesar 93 %. Untuk analisis pencapaian kinerja Sasaran 9 dapat dilihat pada tabel 3.19 berikut.

Tabel 3.19
Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 9

Sasaran 9	Indikator Kinerja	2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 ((%)
		Target	Realisasi	
Meningkatnya kemandirian keuangan	Rasio PAD terhadap APBD	6	5,58	93

Berdasarkan realisasi capaian tersebut, maka kinerja Pemerintah Kota Bima pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 8,53 % dibanding Tahun 2018. Hasil perolehan tersebut mencerminkan kinerja Pemerintah Kota Bima dalam meningkatkan PAD dalam kondisi sangat baik, sebagaimana terlihat pada grafik 3.15 berikut ini.

Grafik 3.15
Perolehan PAD Pemerintah Kota Bima tahun 2015-2019





Perolehan PAD tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 8,53 % dibanding tahun 2018, sedangkan jumlah PAD tertinggi diperoleh tahun 2017, sebagaimana terlihat pada tabel 3.20 berikut.

Tabel 3.20
PAD Pemerintah Kota Bima tahun 2015 - 2019

Tahun	PAD
2015	30.266.723.064,23
2016	30.529.862.792,78
2017	51.892.384.238,67
2018	46.504.957.238,56
2019	50.472.550.773,75

Berdasarkan jenis obyek pajak bahwa pada tahun 2019 perolehan PAD tertinggi dicapai oleh pajak lain-lain sebanyak Rp.21.374.771.345,96.- sedangkan perolehan terendah diperoleh dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp.1.461.853.201,38.- sebagaimana terlihat pada tabel 3.21 berikut.

Tabel 3.21
Rincian PAD berdasarkan Jenis obyek Pajak Kota Bima
Tahun 2019

Jenis Obyek Pajak	Laju Pertumbuhan
Pajak Daerah	Rp. 17.441.637.810,41
Retribusi Daerah	Rp. 10.194.288.416,00
Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	Rp. 1.461.853.201,38
Jumlah lain-lain PAD yang sah	Rp. 21.374.771.345,96
Rata-rata	Rp. 50.472.550.773,75



Faktor pendukung pencapaian kinerja karena adanya peningkatan komitmen petugas dalam mengamankan kebocoran penerimaan PAD, sedangkan **hambatan dalam pencapaian kinerja** berupa masih lemah sistem dan sarana prasarana pelayanan sehingga menghambat transparansi penerimaan. **Solusi** untuk meningkatkan kinerja pelayanan pada penerimaan PAD lingkup Pemerintah Kota Bima melalui identifikasi potensi sumber PAD pada sektor-sektor potensial dan penerapan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi dalam pengelolaan PAD.

j. Sasaran 10 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Untuk mengukur sasaran 10 : meningkatnya kualitas pelayanan publik, diukur dengan menggunakan indikator kinerja yaitu rata-rata skor Indeks Kepuasan Masyarakat. Pelaksanaan pengukuran ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R I Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Rata-rata skor Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Bima tahun 2019 sebesar 82,36 dengan predikat baik. Atas perolehan tersebut, maka Pemerintah Kota Bima telah berhasil mencapai target kinerja sebesar 104 % dari target RPJMD sebesar 78,58.



Analisis pencapaian indikator kinerja sasaran 10 dapat dilihat tabel 3.22 berikut.

Tabel 3.22
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 10

Sasaran 10	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)
		Target	Realisasi	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik.	Rata-rata skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) lingkup Pemerintah Kota Bima	B (78,58)	B (82,36)	104

Adapun hasil pengukuran nilai IKM pada masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik lingkup Pemerintah Kota Bima tersaji pada tabel 3.23 berikut ini.

Tabel 3.23
Pengukuran IKM pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Perangkat Daerah/Unit	IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Layanan
1. Dinas Penanaman Modal dan PTSP	90,53	A	Sangat Baik
2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	93,20	A	Sangat Baik
3. Dinas Pertanian	80,81	B	Baik
4. Dinas Kelautan dan Perikanan	83,44	B	Baik
5. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	85,40	B	Baik
6. Dinas Sosial	79,80	B	Baik
7. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,79	B	Baik

Perangkat Daerah/Unit	IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Layanan
8. Dinas Pariwisata	73,07	C	Cukup
9. RSUD	77,39	B	Baik
10. Puskesmas Rasanae Timur	84,20	B	Baik
11. Puskesmas Mpunda	76,62	B	Baik
12. Puskesmas Penanae	78,93	B	Baik
13. Puskesmas Paruga	83,45	B	Baik
Rata-Rata IKM	82,36	B	Baik

Secara umum perolehan IKM pada unit penyelenggara pelayanan publik rata-rata memperoleh kategori “**Baik**”. Hal ini cukup menggembirakan mengingat Pemerintah Kota Bima termasuk daerah otonom yang baru dibentuk sejak tahun 2002. Adapun persentase kategori Perangkat Daerah/Unit, antara lain ; (1) Sangat baik sebanyak 10 unit atau 15 %;(2) Baik sebanyak 10 Unit atau 78 %;(3) Cukup baik sebanyak 1 unit atau 7 %.

Adapun perolehan nilai rata-rata pada masing-masing unsur pelayanan, dapat tersaji pada grafik 3.16 berikut.

Grafik 3.16
Nilai pada unsur pelayanan publik Tahun 2019





Faktor-faktor pendukung pencapaian sasaran adalah adanya Kemitraan dan koordinasi dengan Dinas/badan teknis terkait; tersedianya Sumber Daya Pegawai yang cukup memadai; tersedianya sarana dan prasarana pendukung. Selain itu faktor pendukung lainnya, dipengaruhi oleh semakin membaiknya penyiapan pada standar pelayanan publik, baik persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya, produk, kompetensi, perilaku pelayanan, maklumat pelayanan, dan penanganan pengaduan, sedangkan **hambatan dalam pencapaian kinerja** berupa masih belum memiliki aplikasi pelayanan online. **Solusi** untuk meningkatkan pelayanan publik di Pemerintah Kota Bima yaitu dengan membuat inovasi layanan berbasis online.

k. Sasaran 11 : Meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang

Untuk mengukur sasaran 11 : meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang, diukur dengan indikator kinerja indeks kesesuaian tata ruang. Indeks kesesuaian tata ruang pada tahun 2019 sebesar 98,1. Berdasarkan perolehan tersebut, maka Pemerintah Kota Bima pada tahun 2019 telah mampu mencapai kinerja sebesar 103 % dari target RPJMD sebesar 95. Untuk rincian analisis capaian kinerja dapat dilihat pada tabel 3.24 berikut.

Tabel 3.24
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 11

Sasaran 11	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)
		Target	Realisasi	
Meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	Indeks kesesuaian tata ruang	95	98,1	103

Berdasarkan analisis data bahwa indeks kesesuaian tata ruang Kota Bima sebesar 98,1, sedangkan yang mengalami ketidaksesuaian sebesar 1,9, sebagaimana rinciannya terlihat pada gambar 3.1 dan 3.2 berikut.

Gambar 3.1
Indikasi ketidaksesuaian lahan tahun 2019



Gambar 3.2
Sebaran titik lokasi indikasi ketidaksesuaian lahan tahun 2019



I. Sasaran 12 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

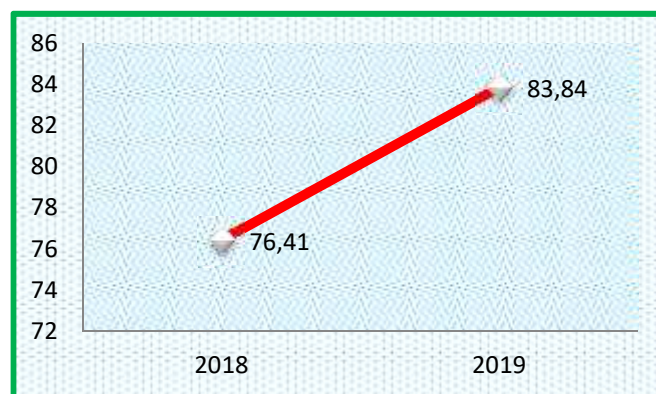
Untuk mengukur sasaran 12 : meningkatnya kualitas lingkungan hidup, diukur dengan indikator kinerja indeks kualitas lingkungan hidup. Indeks kualitas lingkungan hidup di Kota Bima pada tahun 2019 sebesar 83,84 dengan kategori sangat baik. Berdasarkan perolehan tersebut, maka Pemerintah Kota Bima pada tahun 2019 telah mampu mencapai kinerja sebesar 104 % dari target RPJMD sebesar 80. Untuk rincian analisis capaian kinerja sasaran 12 dapat dilihat pada tabel 3.25 berikut.

Tabel 3.25
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 12

Sasaran 12	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)
		Target	Realisasi	
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	80	83,84	104

Jika dibandingkan dengan IKLH Tahun 2018, maka IKLH Kota Bima pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 7,43 sebagaimana terlihat grafik 3.17 berikut.

Grafik 3.17
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bima
Tahun 2018-2019



Faktor pendukung pencapaian sasaran 12 yaitu adanya Program pada Dinas Lingkungan Hidup, meliputi Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. **Faktor penghambat** bahwa adanya air limbah permukiman masih



belum optimal. **Solusinya** diperlukan program pendampingan penanganan sampah skala lingkungan.

m. Sasaran 13 : Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman

Sasaran 13 yaitu meningkatnya kualitas kawasan permukiman, diukur dengan indikator kinerja Persentase luas kawasan kumuh. Persentase luas kawasan kumuh di Kota Bima pada tahun 2019 hanya sisa sebesar 83,82 Ha atau 6,73 % dari seluruh kawasan kumuh di Kota Bima. Pada tahun 2019 bahwa penurunan luas kawasan kumuh di Kota Bima sebesar 91,16 Ha atau atau 29 % dari seluruh kawasan kumuh yang ada. Atas perolehan tersebut, maka Pemerintah Kota Bima telah mampu mencapai kinerja sebesar 127 % dari target RPJMD sebesar 9,22. Untuk rincian analisis capaian kinerja sasaran 13 dapat dilihat pada tabel 3.25 berikut.

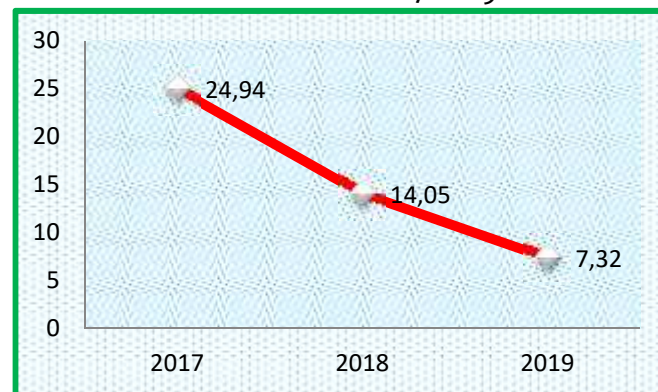
Tabel 3.26
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 13

Sasaran 13	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)
		Target	Realisasi	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase luas kawasan kumuh	9,22	6,73	127

Selanjutnya luas kawasan kumuh di Kota Bima secara berangsur setiap tahunnya terus berkurang. Selama kurun waktu 2 tahun

terakhir Pemerintah Kota Bima telah mampu mengurangi luas kawasan kumuh sebanyak 226,19 Ha atau 72 %, dengan rata-rata pengurangan setiap tahunnya sebesar 113,09 Ha atau 36 %, sebagaimana terlihat grafik 3.18 dan tabel 3.27 berikut.

Grafik 3.18
Luas Kawasan Kumuh di Kota Bima
Tahun 2017-2019



Tabel 3.27
Capaian Pengurangan Kawasan Kumuh Tahun 2017-2019

Tahun	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Luas Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Kumuh (%)	Persentase Penurunan (%)
(1)	(2)	(3)	(4=2/3x100)	5
2017	310,01	1.245	24,94	-
2018	174,98	1.245	14,05	10,89
2019	83,82	1.245	7,32	6,73

Sumber: Kutipan SK Kumuh Nomor: 188.45/747/650/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019

Berdasarkan analisis tabel 3.26 diatas bahwa jumlah penanganan pengurangan kekumuhan pada tahun 2019 lebih kecil dibanding tahun 2018 yang jumlah seluas 174,98 Ha. Saat ini masih terdapat sisa luas kawasan kumuh sebesar 83,84 Ha yang



tersebar pada 23 Kelurahan di Kota Bima dengan tingkat kekumuhan tertinggi berada pada kelurahan lelamase, kelurahan Dara dan dan Kelurahan Kumbe. Rinciannya sebagaimana terlihat pada tabel 3.28 berikut.

Tabel 3.28
Luas Kawasan Kumuh berdasarkan Kelurahan tahun 2019

No	Kelurahan	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Persentase (%)
1.	D o d u	5,77	6,88
2.	Dara	9,10	10,85
3.	Jatibaru	3,25	3,87
4.	K u m b e	8,06	9,61
5.	Kendo	2,52	3,00
6.	Kodo	2,20	2,62
7.	Lampe	5,53	6,59
8.	Lelamase	10,55	12,58
9.	Mande	0,96	1,14
10.	Melayu	4,02	4,79
11.	N i t u	3,87	4,61
12.	N t o b o	5,75	6,85
13.	N u n g g a	0,97	1,15
14.	Paruga	4,11	4,90
15.	Penaraga	2,20	2,62
16.	Penatoi	3,21	3,82
17.	R o n t u	1,44	1,71
18.	Rabadompu barat	0,28	0,33
19.	Rabadompu timur	1,21	1,44
20.	Rabangodu utara	4,69	5,59
21.	Sadia	1,54	1,83
22.	Sambinae	0,39	0,46
23.	Tanjung	2,20	2,62
	Jumlah	83,82	100

dari target nasional di tahun 2019 (RPJMN 2014-2019) sisa kumuh seluas 0 Ha atau 0% dari luas kumuh nasional 38.431 Ha,



maka harapan RPJMN 2014-2019 tidak dapat dipenuhi karena masih tersisa luas kawasan kumuh di Kota Bima.

Faktor pendukung pencapaian sasaran 13 yaitu adanya Program Perencanaan Pemukiman Kumuh melalui kegiatan Pendampingan Perencanaan dan Penanganan Kumuh Kota Bima melalui Pokja PKP dan (Kotaku). **Faktor penghambat bahwa** penanganan sampah permukiman dan penanganan air limbah permukiman sebagai bagian dari upaya terintegrasi mengatasi kekumuhan, masih memerlukan upaya lebih dalam mengurangi kawasan kumuh. **Solusinya** diperlukan upaya terintegrasi penanganan air limbah permukiman dan pengurangan kekumuhan di Kota Bima.

n. Sasaran 14 : Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah

Untuk mengukur sasaran 14 : meningkatnya kualitas infrastruktur daerah, diukur dengan indikator kinerja persentase peningkatan infrastruktur daerah dalam kondisi baik. Persentase peningkatan infrastruktur daerah dalam kondisi baik Kota Bima sebesar 4,21%. Berdasarkan perolehan tersebut, maka Pemerintah Kota Bima tahun 2019 mampu mencapai kinerja sebesar 84 % dari target RPJMD sebesar 5 %. Untuk rincian analisis capaian kinerja sasaran 14 dapat dilihat pada tabel 3.29 berikut.



Tabel 3.29
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 14

Sasaran 14	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)
		Target	Realisasi	
Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	persentase peningkatan infrastruktur daerah dalam kondisi baik	5	4,21	84

Jika dibandingkan dengan Tahun 2018, maka persentase peningkatan infrastruktur daerah dalam kondisi baik di Kota Bima pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 4,21 sebagaimana terlihat tabel 3.30 berikut.

Tabel 3.30
Perbandingan kualitas infrastruktur di Kota Bima tahun 2018-2019

Uraian	Tahun 2018		Tahun 2019	
	Panjang	%	Panjang	%
Saluran Drainase (m)	114.369	46,14	122.530,80	49,43
Jalan (m)	188.210	72,92	189.780	73,53
Jaringan Irigasi Tekhnis (m)	29.835	64,2	31.783,39	68,39
Total	332.414	183,26	344.094,19	191,35
Rata-Rata	110.804,67	61,09	114.698,06	63,78
Pertumbuhan				4,21

Faktor pendukung pencapaian sasaran 14 yaitu adanya keterpaduan pendanaan kegiatan baik yang bersumber dari APBD, APBN maupun dari lembaga non pemerintah lainnya. **Faktor**



penghambat bahwa masih banyaknya jalan di Kota Bima yang belum memiliki status sehingga apabila diterbitkan SK status jalan baru maka akan menambah panjang jalan Kota dengan kondisi yang belum baik. Disamping itu, kerusakan infrastruktur akibat bencana banjir bandang tahun 2016 yang lalu belum sepenuhnya mampu diperbaiki. **Solusinya** diperlukan peningkatan kualitas kemitraan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah dalam pembangunan infrastruktur yang ada di Kota Bima.

o. Sasaran 15 : Meningkatnya Ketahanan terhadap Bencana

Untuk mengukur sasaran 15 : meningkatnya ketahanan terhadap bencana, diukur dengan menggunakan indikator kinerja yaitu indeks ketahanan daerah. Indeks ketahanan daerah Kota Bima tahun 2019 sebesar 84. Atas perolehan tersebut, maka Pemerintah Kota Bima telah berhasil mencapai target kinerja sebesar 105 % dari target RPJMD sebesar 80. Analisis pencapaian indikator kinerja sasaran 15 dapat dilihat tabel 3.31 berikut.

Tabel 3.31
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 15

Sasaran 15	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)
		Target	Realisasi	
Meningkatnya ketahanan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah	80	84	105



Jika dibanding tahun 2018, maka Indeks ketahanan daerah pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 1 poin, Adapun rinciannya tersaji pada tabel 3.32 berikut dibawah ini:

Tabel 3.32
Analisis Pencapaian Prioritas Indeks Ketahanan Daerah
Kota Bima Tahun 2018-2019

Prioritas Penilaian Indeks Ketahanan Daerah	Capaian (%)	
	2018	2019
1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan	97	99
2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu	100	100
3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik	98	98
4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana	90	90
5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana	73	76
6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana	74	75
7. Pengembangan sistem pemulihan bencana	95	95
Rata-rata	83	84

Berdasarkan analisis terhadap 7 prioritas penilaian indeks ketahanan daerah bahwa pada prioritas 1, 2, 3, 4 dan 7 mendapat persentase diatas 90% sedangkan prioritas 5 dan 6 masih mendapat porsentase dibawah 80. Faktor penyebab capaian prioritas 5 dan 6 belum optimal, diantaranya; (1) untuk poin 5 disebabkan oleh masih Lemahnya penegakan hukum (khususnya terhadap *illegal logging*) dan belum optimalnya bangunan penahan gelombang



tsunami, belum terlaksananya revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota; dan (2) poin 6 adalah belum ada penyusunan rencana kontigensi (renkon) tsunami, sistem peringatan dini tsunami, rencana evakuasi bencana tsunami, renkon karhut, sistem peringatan dini karhut, renkon erupsi gunung merapi, sistem peringatan dini bencana erupsi gunung api, infrastruktur evakuasi bencana gunung api, renkon kekeringan, dan sistem peringatan dini kekeringan.

Faktor-faktor pendukung pencapaian sasaran 15 yaitu adanya PUSDALOPS yang telah terintegrasi dengan pusat, sedangkan **hambatan dalam pencapaian kinerja** berupa masih belum optimalnya pencegahan dan mitigasi bencana maupun kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana. **Solusi** untuk kedepannya berusaha meningkatkan program mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.

p. Sasaran 16 : Meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban

Untuk mengukur sasaran 16 : meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban, diukur dengan menggunakan indikator kinerja yaitu Persentase penurunan Angka kriminalitas. Persentase penurunan Angka kriminalitas Kota Bima tahun 2019 sebesar 33 persen dibanding tahun 2018. Atas perolehan tersebut, maka Pemerintah Kota Bima telah berhasil mencapai kinerja



sebesar 152 dari target RPJMD sebesar 30. Analisis pencapaian indikator kinerja sasaran 16 dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 3.33
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 16

Sasaran 16	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)
		Target	Realisasi	
Meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban	Persentase penurunan Angka kriminalitas	30	33	152

Jika dibandingkan dengan angka kriminalitas pada tahun 2018 maka telah terjadi penurunan angka kriminalitas pada tahun 2019 sebesar 575 kasus, sebagaimana yang terlihat pada tabel 3.31 berikut.

Tabel 3.34
Persentase Penurunan Angka Kriminalitas di Kota Bima Tahun 2018-2019

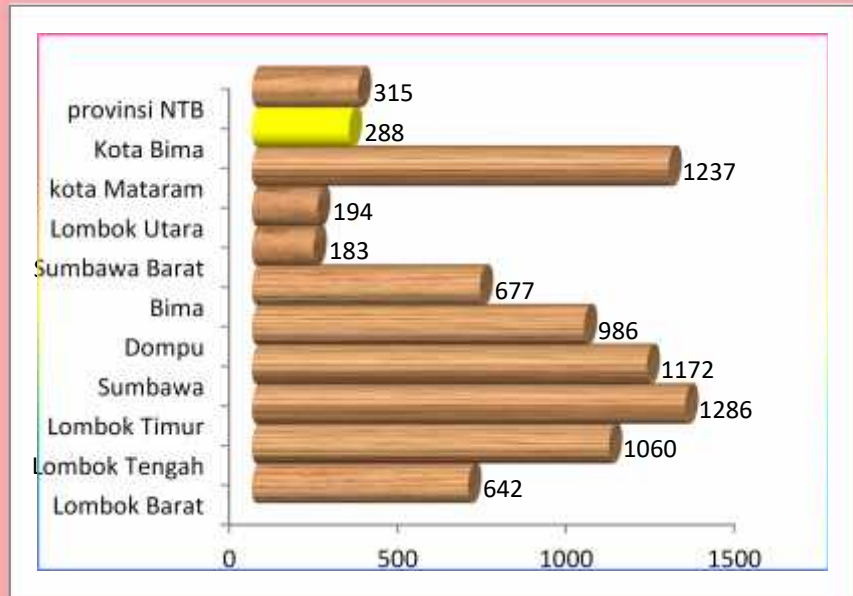
Kasus Kriminalitas	Jumah Kasus		Penurunan	
	2018	2019	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	(5)
Angka Kriminalitas	863	288	575	67

Jika dibandingkan dengan angka kriminalitas yang ada di Kabupaten/Kota lainnya di NTB bahwa jumlah angka kriminalitas di Kota Bima masih termasuk kategori terendah ketiga setelah



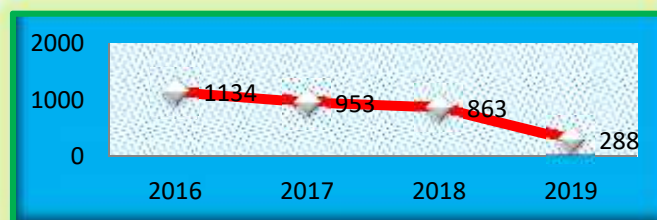
Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Lombok Utara, sebagaimana terlihat pada grafik berikut.

Grafik 3.19
Perbandingan angka kriminalitas Kota Bima dengan Kabupaten/Kota dan Provinsi NTB tahun 2019



Angka kriminalitas di Kota Bima setiap tahunnya terus mengalami penurunan sebagaimana terlihat pada tabel 3.21. Kondisi ini mendeskripsikan bahwa penanganan terhadap kriminalitas telah sangat baik.

Grafik 3.21
Perbandingan angka kriminalitas di Kota Bima tahun 2016-2019





Faktor-faktor pendukung pencapaian sasaran 15 yaitu adanya intervensi program yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan terbentuknya forum-forum seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Konflik Sosial (FPK) yang ikut mendukung penurunan angka kriminalitas dan konflik sosial di Kota Bima, sedangkan **hambatan dalam pencapaian kinerja** berupa masih belum optimalnya pelaksanaan koordinasi lintas sektor dalam pencegahan tindakan criminal. **Solusi** untuk kedepannya berusaha meningkatkan program pencegahan konflik sosial dan kriminalitas.

B. Realisasi Keuangan

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima Tahun 2019 sebesar Rp. 902.173.491.381,85 dengan realisasi sebesar Rp. 769.254.308.670,97 atau 85,23 %. Analisis capaian sasaran dengan rata-rata capaian indikator 110 % dengan kategori Sangat Berhasil dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 41.740.678.680.- atau 13,57%. Sehingga pencapaian sasaran tersebut dapat dikategorikan efektif dan efisien. Analisis efektifitas dan efisiensi pada program dan anggaran pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.32 dan tabel 3.33 berikut.



Tabel 3.35
Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran
Dalam Rangka Pencapaian Sasaran di Kota Bima Tahun 2019

No	Sasaran	Kinerja Tahun 2019			Anggaran Tahun 2019			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	69,55	70,20	101	35.253.978.620	30.069.854.469	85,29%	Efisien
2.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	10,39	12,69	122	36.663.491.453	33.801.514.622	92,19%	Efisien
3.	Meningkatnya Daya Beli masyarakat	Rp. 1.200.000	Rp. 1.399.041	117	1.542.040.300	1.510.981.646	97,99%	Efisien
4.	Meningkatnya ketahanan pangan	83,30	85,5	103	11.199.806.264	10.421.457.125	93,05%	Efisien
5.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	5,80	5,22	90	16.171.934.416	14.515.338.519	89,76%	-
6.	Menurunnya angka kemiskinan	8,9	8,60	103	58.485.696.723	32.333.369.758	55,28%	Efisien
7.	Meningkatnya kesempatan kerja	3,75	4,18	89	649.364.000	625.025.713	96,25%	-
8.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	100	101	101	23.552.745.901	22.267.738.286	94,54%	Efisien
9.	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	6	5,58	93	10.610.128.900	10.147.085.143	95,64%	-
10.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	B (78,58)	B (82,36)	104	21.557.069.000	21.463.741.393	99,57%	Efisien
11.	Meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	95	98,1	103	1.355.942.500	1.292.424.466	95,32%	Efisien
12.	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	80	83,84	104	594.971.000	589.825.000	99,14%	Efisien
13.	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	9,22	6,23	127	25.403.369.356	23.907.547.087	94,11%	Efisien
14.	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	5	4,21	84	57.527.402.653	56.183.082.338	95,31%	-
15.	Meningkatnya Ketahanan terhadap bencana	80	84	105	1.844.221.300	1.757.730.317	95,31%	Efisien
16.	Meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban	30	33	152	5.129.202.900	4.913.970.724	95,80%	Efisien
	Jumlah			106	307.541.365.286	265.800.686.606	86,43%	Efisien



Tabel 3.33
Realisasi Program dan Anggaran Tahun 2019

Sasaran		Anggaran	Realisasi	%
Sasaran 1 : Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat		35.253.978.620	30.069.854.469	85,29%
1.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	7.022.078.010	6.803.205.421	96,88
2.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	818.318.950	755.177.100	92,28
3.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	2.542.746.000	2.211.393.669	86,97
4.	Program Pengadaan,Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	2.000.000.000	1.998.733.131	99,94
5.	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	16.151.332.760	11.886.968.971	73,60
6.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	882.844.000	862.631.000	97,71
7.	Kebijakan Kesehatan,Pembiayaan Kesehatan dan Hukum Kesehatan	2.861.003.000	2.821.144.767	98,61
8.	Program Keluarga Bencana	2.236.552.400	2.017.764.910	90,22
9.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	330.951.500	326.917.500	98,78
10.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	408.152.000	385.918.000	94,55
Sasaran 2 : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan		36.663.491.453	33.801.514.622	92,19%
1.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	5.669.412.000	5.281.490.000	93,16
2.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	28.524.613.500	26.143.650.523	91,65
3.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	561.567.003	496.598.505	88,43
4.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	491.327.000	491.327.000	100,
5.	Program Pendidikan Non Formal	106.440.000	96.525.000	90,68
6.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	776.335.700	776.335.700	98,17
7.	Penyelamatan dan Pelestaria Dokumen/Arsip Daerah	144.029.750	144.029.750	100
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	34.985.000	34.985.000	100



Sasaran		Anggaran	Realisasi	%
9.	Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	54.250.000	54.250.000	100
10.	Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak	300.531.500	296.497.500	98,66
Sasaran 3 : Meningkatnya daya beli masyarakat		1.542.040.300	1.510.981.646	97,99%
1.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	280.815.000	279.979.465	99,70
2.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	244.282.000	237.480.954	97,22
3.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	186.223.200	178.493.867	95,85
4.	Program Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	296.979.900	296.828.863	99,95
5.	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	533.740.200	518.198.497	97,09
Sasaran 4 : Meningkatnya ketahanan pangan		11.199.806.264	10.421.457.125	93,05%
1.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	881.593.664	860.003.592	97,55
2.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	10.318.212.600	9.561.453.533	92,67
Sasaran 5 : Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi		16.171.934.416	14.515.338.519	89,76%
1.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	741.852.000	737.006.989	99,35
2.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	1.722.726.000	1.668.548.694	96,86
3.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2.316.382.500	2.292.817.173	98,98
4.	Pogram Pengembangan Destinasi Pariwisata	3.708.487.416	3.629.112.580	97,86
5.	Program Pengembangan Industri Dan Kemitraan Pariwisata	49.815.000,00	48.655.315,00	97,67
6.	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	605.785.800	597.167.800	98,58
7.	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	400.105.000	344.114.565	86,01
8.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	519.486.100	500.648.100	96,37



Sasaran		Anggaran	Realisasi	%
9.	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	847.380.600	296.595.473	35,00
10.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	3.519.432.000	3.414.989.188	97,03
11.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1.451.597.000	767.018.332	52,84
12.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	110.575.801	109.332.155	98,88
13.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	178.309.199	109.332.155	61,32
Sasaran 6 : Menurunnya angka kemiskinan		58.485.696.723	32.333.369.758	55,28%
1.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (Kat) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1.131.925.000	465.832.500	41,15
2.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	610.472.000	598.557.130	98,05
3.	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	2.087.091.400	2.059.470.500	98,68
4.	Program Pengembangan Perumahan	770.178.000	714.480.350	92,77
5.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	12.128.394.822	11.710.809.734	96,56
6.	Program Peningkatan Pelayanan Kedaruratan dan Logistik	607.973.700	586.711.708	96,50
7.	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	39.250.834.801	14.352.477.272	36,57
8.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.898.827.000	1.845.030.564	97,17
Sasaran 7 : Meningkatnya kesempatan Kerja		649.364.000	625.025.713	96,25%
1.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	232.680.000	220.929.520	94,95
2.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	416.684.000	404.096.193	96,98
Sasaran 8 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah		23.552.745.901	22.267.738.286	94,54%
1.	Program Peningkatan Sistem	1.812.451.826	1.785.580.637	98,52



Sasaran		Anggaran	Realisasi	%
	Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.			
2.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	215.815.000	210.435.466	97,51
3.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.592.914.816	1.558.097.696	97,81
4.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	7.327.046.202	7.060.890.921	96,37
5.	Program Peningkatan Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah	1.196.786.440	1.134.252.815	94,77
6.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.116.764.740	1.050.531.082	94,07
7.	Program Peningkatan Kompetensi Aparatur	1.766.559.000,00	1.526.948.302	86,44
8.	Program Pembangunan Sistem Informasi yang Terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian Kota Bima	364.936.000	362.815.134	99,42
9.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1.488.601.100	1.249.779.980	83,96
10.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.382.019.077	5.049.176.852	93,82
11.	Program Pengembangan E-Government dan Pelayanan TIK	1.288.851.700	1.279.229.401	99,25
Sasaran 9 : Meningkatnya kemandirian keuangan daerah		10.610.128.900	10.147.085.143	95,64%
1.	Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.680.380.500	2.604.126.763	97,16
2.	Peningkatan Layanan Perparkiran	435.567.000	360.527.000	82,77
3.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	7.494.181.400	7.182.431.380	95,84
Sasaran 10 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik		21.557.069.000	21.463.741.393	99,57%
1.	Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana dan	20.809.319.000	20.729.546.230	99,62



Sasaran		Anggaran	Realisasi	%
	Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya			
2.	Pengembangan Dan Pengelolaan Terminal	120.200.000	120.200.000	100
3.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	627.550.000	613.995.163	97,84
Sasaran 11 : Meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang		1.355.942.500	1.292.424.466	95,32%
1.	Program Perencanaan Tata Ruang	809.547.500	786.241.866	97,12
2.	Program Pemanfaatan Ruang	380.905.000	360.827.600	94,73
3.	Program Pengembangan Kawasan	165.490.000	145.355.000	87,83
Sasaran 12 : Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup		594.971.000	589.825.000	99,14%
1.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	330.221.000	326.465.000	98,86
2.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam	264.750.000	263.360.000	99,47
Sasaran 13 : Meningkatnya kualitas kawasan permukiman		25.403.369.356	23.907.547.087	94,11%
1.	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	4.646.143.500	4.485.024.576	96,53
2.	Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong	6.110.167.356	5.252.789.956	85,97
3.	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan	14.065.244.000	13.690.202.325	97,33
4.	Program Perencanaan Permukiman Kumuh	581.814.500	479.530.230	82,42
Sasaran 14 : Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah		57.527.402.653	56.183.082.338	95,31%
1.	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	19.572.062.980	18.705.799.930	95,57
2.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	16.412.819.460	16.258.824.460	99,06
3.	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	431.547.000	426.979.000	98,94
4.	Program Pengembangan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa/Jaringan Pengairan	5.585.187.000	5.420.319.162	97,05



Sasaran		Anggaran	Realisasi	%
5.	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	9.369.805.213	9.317.424.813	99,44
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Penerangan Jalan, Taman Dan Hutan Kota	5.897.731.000	5.812.845.973	98,56
7.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan	258.250.000	240.889.000	93,28
Sasaran 15 : Meningkatkan Ketahanan terhadap bencana		1.844.221.300	1.757.730.317	95,31%
1.	Program Kesiapsiagaan Dan Pencegahan	1.151.442.300	1.143.783.632	99,33
2.	Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	692.779.000	613.946.685	88,62
Sasaran 16 : Meningkatkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban		5.129.202.900	4.913.970.724	95,80%
1.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	557.985.000	500.028.460	89,61
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	2.178.196.500	2.158.717.423	99,11
3.	Program Pendidikan Politik Masyarakat	636.841.400	595.429.841	93,50
4.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1.330.692.000	1.302.392.000	97,87
5.	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	400.317.000	332.232.000	82,99
6.	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	25.171.000	25.171.000	100
Jumlah		307.541.365.286	265.800.686.606	86,43



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Kota Bima Tahun 2019 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan Pemerintah yang baik (*Good Governance*). Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja bahwa rata-rata kinerja Pemerintah Kota Bima sebesar 110 atau telah mencapai kategori sangat tinggi. Keberhasilan capaian kinerja tersebut didukung adanya kerja sama yang sinergis dari seluruh jajaran Perangkat Daerah dan pihak-pihak yang terkait.

Pencapaian kinerja Pemerintah Kota Bima tahun 2019 menunjukkan keberhasilan dalam memenuhi target tahunan sesuai RPJMD 2018-2023



sebagaimana telah dilaksanakan pengukuran pada 16 (sebelas) sasaran dan 18 indikator kinerja. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Pemerintah Kota Bima dapat dinyatakan sangat tinggi sebanyak 13 sasaran (81,25 %) dan kategori tinggi sebanyak 3 sasaran (18,75 %).

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kota Bima juga didukung dengan adanya alokasi APBD Pemerintah Kota Bima tahun Anggaran 2019. Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2019 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Adapun adanya target yang masih kurang pencapaiannya Pemerintah Kota Bima akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit untuk perbaikan penanganan di masa mendatang. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bima Tahun 2019 kami sampaikan dan atas kerjasama serta dukungan seluruh pihak disampaikan ucapan terima kasih.

The background is a vibrant orange color. It features a pattern of semi-transparent hexagons in various shades of yellow, light orange, and brown, scattered across the top and bottom. Diagonal lines in white and yellow run from the top-left towards the bottom-right. A large, semi-transparent white rounded rectangle is positioned in the lower center, containing text.

BAGIAN ORGANISASI

*Jl. Soekarno Hatta No.2, Kota Bima - NTB
Tlp. 0374. 646441 - 646442. Fax. 0374. 646441*